

@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM SORONG
KOTA SORONG**

TESIS



KUNDRAT PATTIPI

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI
2017**

@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM SORONG
KOTA SORONG**

TESIS

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh
Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Lingkungan
Program Pascasarjana UNIPA



Oleh:

KUNDRAT PATTIPI
NIM. 201302024

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM
SORONG KOTA SORONG

Nama : KUNDRAT PATTIPI

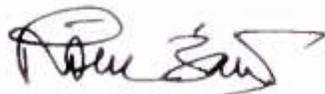
NIM : 201302024

Proram Studi : Ilmu Lingkungan

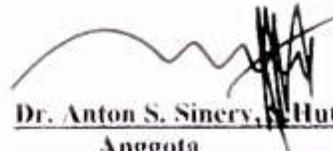
Program Pendidikan : Strata 2

Telah diuji oleh tim penguji ujian akhir dan dinyatakan LULUS
Pada Tanggal 31 Mei 2017

Disetujui
Komisi Pembimbing

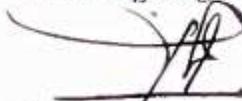


Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
Ketua



Dr. Anton S. Sinery, S.Hut., MP.
Anggota

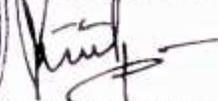
Ketua Program Studi
Ilmu Lingkungan



Dr. Ir. Eko Agus Martanto, MP.
NIP. 19680229 199203 1 002



Direktur Program
Pascasarjana UNIPA



Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs M.Si.
NIP. 19640417 199203 1 003



HALAMAN PENETAPAN PENGUJI TESIS

Tesis ini telah diuji pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 30 Mei 2017

Panitia Penguji Tesis

	Nama	Penguji
1.	Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si	Penguji I
2.	Dr. Anton S. Sinery, S.Hut., MP	Penguji II
3.	Dr. Ir. Ihcwan Tjolli, M.Si	Penguji III
4.	Dr. Stefanus Pakage, S.Pt., M.P	Penguji IV



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kundrat Pattipi
NIM : 201302024
Program Studi : Ilmu Lingkungan
Program Pendidikan : Strata 2

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan bebas plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan PERMENDIKNAS RI No. 17 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Manokwari, 31 Mei 2017

Yang Menyatakan,

Kundrat Pattipi



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Papua, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kundrat Pattipi
NIM : 201302024
Program Studi : Ilmu Lingkungan
Program Pendidikan : Strata 2

demikian pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan, menyetujui untuk memberikan kepada PPs UNIPA Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM SORONG KOTA SORONG

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif kepada PPs UNIPA untuk berhak menyimpan, mengalihmedia /formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Manokwari

Pada tanggal, 31 Mei 2017

Yang Menyatakan,

Kundrat Pattipi



RIWAYAT HIDUP



Kundrat Pattipi, lahir di Siboru Fakfak pada tanggal 10 Oktober 1970, merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, dari pasangan Bapak Duad Pattipi (alm) dan Ibu Yosina Hombere. Tahun 1980 memulai pendidikan dasar di SD YPK Siboru Fakfak dan tamat pada tahun 1985, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1985 di SMP YPK Fakfak dan tamat pada tahun 1988. Pada tahun yang sama melanjutkan ke Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Fakfak dan tamat pada tahun 1991.

Pendidikan tinggi dimulai tahun 1997 di Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih dan selesai pada tahun 2001. Pada tahun 1997 penulis memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dan pada tahun 2003 diangkat pada jabatan Kasubag Kepegawaian pada Pemerintah Kota Jayapura yang selanjutnya dimutasi ke Provinsi Irian Jaya Barat pada tahun 2006. Tahun 2013 diangkat pada Jabatan Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat sampai saat ini. Menikah dengan Ellen Tanati pada tahun 1996 dan dikaruniai empat orang anak bernama Virginia Carztensa Pattipi, Trevigiane Gloria Pattipi, Kevin Joman Pattipi dan Clifford Garrd Given Pattipi.



ABSTRAK

Salah satu kunci keberhasilan upaya pelestarian sumberdaya hutan adalah memeransertakan beberapa pihak (*stakeholders*), dalam hal ini yang paling potensial ditinjau dari sisi jumlahnya, akses, dan kepentingan (dalam arti ketergantungan kehidupan dan penghidupan) yang dimilikinya adalah masyarakat lokal sekitar hutan. Masyarakat lokal khususnya masyarakat tradisional berdasarkan berbagai penelitian terbukti memiliki kearifan (*lokal wisdom* dan *conservation ethics*) dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya pengelolaan hutan secara lestari. Secara prinsip pengelolaan hutan lestari harus didukung dengan manajemen pengelolaan yang terarah dan pasti. Dalam hal ini pembagian kawasan hutan berdasarkan peruntukan fungsinya, kelembagaan, pendanaan dan partisipasi para pihak khususnya masyarakat harus dilakukan secara baik sehingga terwujud kelestarian lingkungan dalam pembangunan. Mengingat bahwa upaya konservasi hutan menjadi penting di masa mendatang, sehingga perlu dilakukan upaya nyata guna pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan dan diharapkan dengan adanya perencanaan secara baik dapat mewujudkan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan seperti halnya Taman Wisata Alam Sorong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi unsur masyarakat lokal dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong dan memberikan rumusan alternatif upaya yang dapat mendukung keberhasilan pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong tertinggi pada kelompok keluarga (15 responden atau 40,54%) dan terendah adalah kelompok pemimpin (1 responden atau 2,70%), demikian halnya dengan intensitas partisipasi masyarakat. Partisipasi unsur masyarakat di Taman Wisata Alam Sorong mencakup kelompok pemimpin, minat, kepala keluarga, ibu rumah tangga dan pemuda dengan tingkat partisipasi “sangat tidak aktif dan tidak aktif” yang dipengaruhi fungsi partisipasi masyarakat yang umumnya pada pelaksana kegiatan dan intensitas partisipasi unsur masyarakat yang umumnya memberikan konsultasi dan memberikan informasi. Upaya pengelolaan yang dilakukan meliputi mengupayakan aspek legalitas kawasan (IUPJWA dan IUPSWA) sehingga menjadi dasar pengelolaan program, mengupayakan pembayaran hak ulayat untuk menjamin eksistensi kawasan terkait klaim dari masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, manajemen, pengambilan keputusan, melakukan inisiatif tindakan dan pengendalian program, dan meningkatkan frekuensi sosialisasi dan penyuluhan yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang arti ekonomi dan arti ekologi hasil-hasil program pengelolaan.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Taman Wisata Alam Sorong



ABSTRACT

Community Participation in Management Conservation Program at the Sorong Nature Recreation Park, Sorong

Kundrat Pattipi¹⁾, Roni Bawole²⁾, Anton S. Sinery²⁾

The aim of the research is to know the participation level of communities in the program management of Sorong natural recreation park and provide alternative recommendations efforts that can support the success of the management of this programs based on community participation. The results of the research, it is that community participation in management of Sorong natural recreation park is highest among family group (15 respondent or 40,54%) and lowest is leader group (1 responden or 2,70%), so is intensity of community participation. Community participation in Sorong nature recreation park includes group of leaders, interests, head of household, housewife and youth with participation level "very inactive and inactive" influenced by community participation function which generally at implementing activity and intensity of participation of society element generally Provide consultation and provide information. Management efforts include seeking legality aspects of the area to be the basis of program management, seeking the payment of customary rights to ensure the existence of claims-related areas of the community, involving communities in planning, maintenance, management, decision-making, initiative of action and control programs, and increasing the frequency of socialization and counseling that can provide insight into the community about the economic means and the ecological meaning of the results of the management program.

Keywords: participation, community, sorong natural recreation park.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya sehingga penyusunan tesis ini yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong Kota Sorong**” dapat diselesaikan.

Kawasan Taman Wisata Alam Sorong Kota Sorong merupakan salah kawasan konservasi di wilayah Papua Barat yang diperhadapkan dengan berbagai potensi baik pendukung maupun ancaman dalam pengelolaannya. Berbagai upaya telah dilakukan terkait perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hutan ini, namun ancaman terhadap eksistensi kawasan ini terus berlangsung. Keberadaan pemukiman, kebun masyarakat, pembangunan akses jalan pengangkutan material dan pemanfaatan hasil hutan di areal ini mengindikasikan bahwa kawasan ini sedang mengalami ancaman terkait fungsinya. Keberadaan kampung, areal pertanian dan jalan yang ada merupakan potensi sekaligus ancaman terhadap kawasan TWA ini bila tidak dikelola secara baik, oleh karenanya perlu dilakukan pengelolaan secara baik sehingga jaminan kelestarian kawasan tetap terjaga dimasa mendatang.

Dalam tesis ini dideskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong yang mencakup fungsi partisipasi, intensitas partisipasi dan tingkat partisipasi. Selanjutnya dari hasil identifikasi tersebut dirumuskan juga sejumlah arahan guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman wisata ini dalam perspektif partisipasi masyarakat.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Maha Esa, karena atas rahmatNya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong Kota Sorong**” dapat diselesaikan.

Pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Papua yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan studi.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Papua yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan studi.
3. Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Papua Yang telah memberikan dukungan selama Pelaksanaan studi.
4. Bapak Prof.Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si dan Dr. Anton S. Sinery, S.Hut., MP, selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis ini.
5. Istri tercinta Ellen Tanati dan anak-anaku tersayang Virginia Cartenza Pattipi, Trivigiane Gloria Pattipi, Kevin Joman Pattipi dan Clifford Gerred Given Pattipi, yang senantiasa memberi doa dan motivasi untuk pencapaian tujuan pendidikan ini.

@Hak cipta pada UNIPA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam studi baik proses perkuliahan dan penelitian sampai penyelesaian tesis, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan rahmatNya kepada kita semua.

Akhirnya semoga tesis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Manokwari, 30 Mei 2017

Kundrat Pattipi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI TESIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Sumberdaya Hutan Dalam Pembangunan	7
2.1.1. Fungsi dan Pengelolaan Hutan di Indonesia.....	7
2.1.2. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia	9
2.1.3. Deforestasi dan Degradasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya	11
2.2. Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya.....	12
2.2.1. Ruang Lingkup Konservasi.....	12





2.2.2.	Peran Serta Masyarakat dan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya	15
2.3.	Partisipasi Masyarakat	19
2.3.1.	Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat	19
2.3.2.	Bentuk Partisipasi	21
2.3.3.	Tingkat Partisipasi	22
2.3.4.	Manfaat Partisipasi	23
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	25
3.1.	Waktu dan Tempat	25
3.2.	Alat dan Bahan	25
3.3.	Data Penelitian	26
3.4.	Penentuan Responden	26
3.5.	Pengambilan Data	28
3.6.	Analisis Data	30
BAB IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1.	Kondisi Umum Taman Wisata Alam Sorong... ..	33
4.1.1	Sejarah Kawasan	33
4.1.2	Penguahan Kawasan	34
4.1.3	Letak dan Luas	35
4.1.4	Iklim	36
4.1.5	Topografi	37
4.1.6	Geologi dan Tanah	38
4.1.7	Hidrologi	38
4.1.8	Sosial Ekonomi dan Budaya	39
4.1.9	Estetika	40
4.2.	Partisipasi Masyarakat	41
4.2.1	Fungsi dan Intensitas Partisipasi Masyarakat	47
4.2.2	Tingkat Partisipasi dan Persepsi Unsur Masyarakat	54
4.3.	Permasalahan, Tujuan dan Alternatif Upaya Mendukung Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong	61



@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

4.3.1.	Permasalahan.....	61
4.3.2.	Tujuan	63
4.3.3.	Upaya yang Dapat Dilaksanakan	64
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1.	Kesimpulan	66
5.2.	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN.....	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Matriks Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penelitian	29
2. Participation-Empowerment index	30
3. Suhu, Kelembaban Udara dan Hari Hujan di Kota Sorong	37
4. Kondisi Kelas Lereng Kawasan TWA Sorong	37
5. Kondisi TWA Sorong Berdasarkan Jenis Tanah	38
6. Jumlah Penduduk Distrik Sorong Timur	39
7. Fungsi Partisipasi Kelompok Tani Matoa dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong	43
8. Intensitas Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong	46
9. Fungsi dan Intensitas Partisipasi Unsur Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong	47
10. Pendapat Masyarakat Terhadap Berpartisipasi	59
11. Persepsi Masyarakat Tentang Kemauan Berpartisipasi	60
12. Alternatif Upaya Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong Berbasis Kolaborasi	64

@Hak cipta pada UNIPA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Pengambilan Data Pada Responden Kelompok Masyarakat dan BBKSDA Papua Barat.....	27

@Hak cipta pada UNIPA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Partisipasi KTH Matoa Berdasarkan Program Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong	72
2. Penentuan Bentuk Fungsi dan Intensitas Partisipasi KTH Matoa	74
3. Peta Lokasi Penelitian	75



BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki areal hutan yang cukup luas di Indonesia. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.783/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat diketahui bahwa wilayah ini memiliki luas hutan 9.713.137 ha. Luas tersebut mencakup kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) 2.640.258 ha, hutan lindung (HL) 1.631.589 ha, hutan produksi terbatas (HPT) 1.778.480 ha, hutan produksi (HP) 2.188.160 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) 1.474.650 ha. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki 43,98% kawasan hutan dengan fungsi perlindungan (KSA/KPA dan hutan lindung) dari luas kawasan hutan wilayah ini dan menjadi salah satu dasar pertimbangan penancangan wilayah ini sebagai Provinsi Konservasi selain pertimbangan dampak pembangunan terhadap lingkungan (Sinery dkk, 2017).

Luas kawasan hutan tersebut didasarkan pada data penataan kawasan, meskipun luas tutupan hutan yang sebenarnya di lapangan saat ini diperkirakan jauh lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai pemanfaatan sumber daya hutan baik kayu industri, perladangan dan pembangunan perkebunan, pemukiman dan lainnya yang secara periodik menyebabkan berkurangnya luaskawasan hutan.



Mempertimbangkan dinamika pembangunan termasuk peningkatan penduduk, maka pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terpadu melalui partisipasi yang baik dari setiap pelaku pembangunan termasuk masyarakat. Menurut Sardjono (2001) bahwa salah satu kunci keberhasilan upaya pelestarian sumberdaya hutan adalah memeransertakan beberapa pihak (*stakeholders*), dalam hal ini yang paling potensial ditinjau dari sisi jumlahnya, akses, dan kepentingan (dalam arti ketergantungan kehidupan dan penghidupan) yang dimilikinya adalah masyarakat lokal sekitar hutan. Masyarakat lokal khususnya masyarakat tradisional berdasarkan berbagai penelitian terbukti memiliki kearifan (*lokal wisdom* dan *conservation ethics*) dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya pengelolaan hutan secara lestari.

Secara prinsip pengelolaan hutan lestari harus didukung dengan manajemen pengelolaan yang terarah dan pasti. Dalam hal ini pembagian kawasan hutan berdasarkan peruntukan fungsinya, kelembagaan, pendanaan dan partisipasi para pihak khususnya masyarakat harus dilakukan secara baik sehingga terwujud kelestarian lingkungan dalam pembangunan (Sinery, 2015). Mengingat bahwa upaya konservasi hutan menjadi penting di masa mendatang, sehingga perlu dilakukan upaya nyata guna pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. Diharapkan dengan adanya perencanaan secara baik dapat mewujudkan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan seperti halnya Taman Wisata Alam Sorong yang diperhadapkan dengan berbagai potensi terkait eksistensi kawasan hutan ini.



1. 2. Rumusan Masalah

Taman Wisata Alam Sorong ditunjuk berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 397/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 sebagai kawasan konservasi darat di Kota Sorong dengan luas wilayah 945,9 ha (BBKSDA Papua Barat, 2014) yang selanjutnya melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 kewenangan pengelolaannya diserahkan dari Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat.

Secara administrasi TWA Sorong termasuk dalam wilayah Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Sebagai satu-satunya kawasan hutan yang masih terjaga di wilayah Kota Sorong, TWA ini memegang peranan penting bagi keseimbangan ekosistem Kota Sorong khususnya dalam penyediaan udara bersih, air bersih dan pemenuhan kebutuhan rekreasi alam.

Kawasan ini memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, meliputi keragaman flora, fauna termasuk keragaman non hayati. Diketahui bahwa kawasan ini memiliki kekayaan flora yang cukup tinggi dan bernilai ekonomis seperti berbagai jenis tumbuhan obat dan jenis anggrek serta berbagai jenis satwa liar (Ponisri, 2012). Menurut BBKSDA Papua Barat (2014) TWA Sorong, memiliki 200 Ha tegakan hutan tanaman (*Agathis labillardieri*, *Podocarpus blumei*, *Araucaria cunninghamii* dan *Eucalyptus deglupta*), 57 jenis tumbuhan berkayu sebagian merupakan jenis yang dikonsumsi (lansat, cempedak, durian, mangga dan lainnya), 28 jenis anggrek, 83 jenis satwa (13 jenis mamalia, 51 jenis aves, 16 jenis reptil, 3 jenis amphibia). Sebelas jenis diantaranya dilindungi dan enam jenis endemik masing-masing cenderawasih kecil

(*Paradiseae minor-minor*), kepundang/kowak (*Oriolus zelayi*), burung cabe (*Melanocmaris nigra*), rangkong (*Rhyticerus licatus*), burung elang (*Acipiter fasciatus*, *A. novaeholandae*) dan katak (*Bufo melanotictus*).

Kawasan ini secara geografis strategis di Kota Sorong, sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan termasuk masyarakat. Menurut Ponisri (2012) keberadaan Taman Wisata Alam Sorong memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat sekitar kawasan ini. Masyarakat sekitar memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan ini, karena merupakan tempat menggantungkan kehidupan sehari-hari, baik sebagai sumber bahan makanan, obat-obatan, kayu bakar, bahan bangunan dan berbagai tanaman hias yang dapat dijual, khususnya anggrek yang mempunyai nilai jual tinggi.

Sejak dikelola oleh Dirjen PHKA sampai ke BBKSDA Papua Barat berbagai upaya telah dilakukan terkait perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hutan ini, namun ancaman terhadap eksistensi kawasan ini terus berlangsung. Keberadaan pemukiman, kebun masyarakat, pembangunan akses jalan pengangkutan material dan pemanfaatan hasil hutan di areal ini mengindikasikan bahwa kawasan ini sedang mengalami ancaman terkait fungsinya. Menurut Ponisri (2012), ada 2 kampung yang masyarakatnya memanfaatkan kawasan Taman Wisata Alam Sorong yaitu Kampung Klablim dan Klasaman. Selanjutnya menurut BBKSDA Papua Barat (2011) terdapat beberapa kampung yang masyarakatnya memanfaatkan kawasan hutan ini yaitu Kampung Km 14, Kampung Srahwata, Kampung Kolam Susu. Keberadaan kampung-kampung tersebut merupakan potensi sekaligus ancaman terhadap kawasan TWA ini bila



tidak dikelola secara baik, oleh karenanya perlu dilakukan pengelolaan secara baik sehingga jaminan kelestarian kawasan tetap terjaga dimasa mendatang.

Sejauh ini laporan atau hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat lokal khususnya di Taman Wisata Alam Sorong belum terdokumentasikan, sehingga upaya untuk menggali informasi tentang partisipasi masyarakat di wilayah ini patut dilakukan dan salah satunya melalui penelitian ini. Partisipasi dimaksud mencakup siapa saja yang sejauh ini telah berpartisipasi dalam program pengelolaan TWA Sorong, dalam hal apa berpartisipasi dilakukan (fungsi partisipasi), bagaimana partisipasi dilakukan (Intensitas partisipasi) dan bagaimana persepsi masyarakat tentang partisipasi serta bagaimana upaya pengelolaan yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaan dalam perspektif partisipasi masyarakat.

1. 3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui tingkat partisipasi unsur masyarakat lokal dalam program pengelolaan TWA Sorong.
- 2) Memberikan rumusan alternatif upaya yang dapat mendukung keberhasilan pengelolaan TWA Sorong berbasis partisipasi masyarakat.

1. 4. Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai bahan masukan/rujukan bagi pemerintah dan instansi yang berwenang dalam pembuatan kebijakan terkait pengelolaan TWA Sorong



@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

- 2) Bagi masyarakat; sebagai acuan dan sumber informasi yang dapat melahirkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi masyarakat dalam program pengelolaan TWA Sorong.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sumberdaya Hutan Dalam Pembangunan

2.1.1. Fungsi dan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Menurut Suparmoko (1997), hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu. Jadi hutan merupakan sumberdaya biologis tertentu. Hutan merupakan sumberdaya biologis yang terpenting di muka bumi dengan sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Hutan merupakan tipe tumbuhan yang terluas distribusinya dan mempunyai produktifitas biologis yang tertinggi, dengan luas areal 22% dari luas daratan di bumi ini;
- 2) Hutan mencakup kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta bukan kehidupan seperti tanah, air dan sebagainya yang bersama-sama membentuk struktur biologis dan fungsi kehidupan;
- 3) Regenerasi hutan cepat dan kuat dibanding sumberdaya lainnya. Permudaan hutan dapat secara alami maupun dengan campur tangan manusia;
- 4) Hutan disamping menyediakan bahan mentah bagi industri dan bangunan, juga melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan.

Dalam perencanaan mikro yang menyangkut hutan adalah menetapkan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan kawasan suaka margasatwa langkah ini dinamakan sebagai penetapan kawasan hutan menurut fungsinya (Simon, 2001). Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yang terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Oleh karena itu, hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu : fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung. Pada Pasal (1) Undang-undang No 41 tahun 1999 (tentang Kehutanan) juga menyatakan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Berdasarkan distribusinya, sebagian dari hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Luas hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo (dulunya Zaire) dan hutan ini memiliki kekayaan hayati yang unik. Tipe-tipe hutan utama di Indonesia terdiri dari hutan *Dipterocarpaceae* dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan. Hutan Monsun Musiman dan Padang Savana di Nusa Tenggara, Hutan *Non Dipterocarpaceae* dataran rendah dan kawasan Alpin di Irian Jaya



(Papua) dan Indonesia juga memiliki Hutan Mangrove terluas di dunia (FWI/GFW, 2001).

Lebih jauh dikemukakan FWI/GFW (2001), di Indonesia, hampir seluruh hutan dikuasai Negara dan secara administratif lahan-lahan hutan ini dipetakan oleh pemerintah berdasarkan penggunaan dan fungsinya. Departemen Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini) bertanggung jawab atas kawasan hutan yang berstatus hutan permanen, yaitu hutan-hutan yang telah dialokasikan sebagai hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi.

Perkembangan yang terjadi dalam lingkungan internasional baik dalam bidang perdagangan maupun komitmen negara-negara yang tergabung dalam international tropical timber organization (ITTO) serta komitmen dalam KTT Bumi di Rio De Janeiro telah banyak memberikan warna dalam sistem pengelolaan hutan sekarang ini dan masa mendatang. Sejak tahun 1990, dalam konferensi anggota ITTO di Bali telah ditetapkan tahun 2002 sebagai tahun target tercapai pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*). Kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari terdiri dari pemantauan dan keamanan kawasan, kelestarian produksi, kelestarian ekologi, kelestarian manfaat sosial budaya dan institusi (Sarijanto, 1995).

2.1.2. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia

Hutan dan ekosistemnya sebagai salah satu sumber kekayaan alam dengan berbagai fungsi yang serbaguna dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada



umumnya. Dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan antara lain untuk penggunaan hutan dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) (Pamulardi, 1999). Dalam perspektif konservasi hutan dimanfaatkan dengan untuk pendidikan dan penelitian, pariwisata melalui izin usaha pengelolaan jasa wisata alam (IUPJWA) dan izin usaha pengelolaan sarana wisata alam (IUPSWA), Sinery (2015).

Intensifikasi pengusahaan hutan alam produksi di Indonesia (khususnya di luar Pulau Jawa) dilaksanakan dengan titik tolak Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967. Dalam rentang waktu tiga dasawarsa kekayaan alam hutan produksi telah terbukti mampu mendukung pembangunan nasional, terutama dalam mendukung perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja.

Pada saat ini umumnya setiap keputusan pemerintah selalu memiliki sasaran ganda (*multiobjectives*) dalam penggunaan sumberdaya alam seperti demi pertumbuhan ekonomi, mempertahankan keseimbangan lingkungan, pemerataan distribusi pendapatan, kekayaan, maupun kekuasaan, serta keinginan untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada kekuatan asing (Suparmoko, 1997).

Secara umum kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan kawasan konservasi, mengingat kawasan konservasi merupakan bagian dari sumberdaya alam, maka kebijakan dan hukum pengelolaan sumberdaya alam (Sembiring dkk, 1999).



2.1.3. Deforestasi dan Degradasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya

Menurut Zain (1997), kegiatan eksploitasi hutan, kebakaran hutan, pendudukan tanah hutan, dan perladangan berpindah merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Lebih jauh dijelaskan berbagai macam kerugian yang ditimbulkan oleh berbagai gangguan hutan antara lain :

- 1) Pengrusakan terhadap hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah dan penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari fungsinya, serta perusahaan hutan tidak bertanggung jawab;
- 2) Pengrusakan tanah hutan akibat pengambilan batu, pasir, tanah, dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan tegakan;
- 3) Pengrusakan tegakan hutan, misalnya pencurian kayu, penebangan tanpa izin;
- 4) Pengrusakan akibat pengembangan ternak dalam hutan dan kebakaran hutan;
- 5) Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya-daya alam.

Sesungguhnya manajemen berkelanjutan dari hutan tropis yang dilakukan industri per kayu termasuk pengontrolan “logging” yang selektif, perawatan hutan yang tersisa dan untuk tanah hutan, penanaman kembali pohon asli, dan penyediaan waktu yang memadai untuk generasi pada hutan yang telah ditebang, masih betul-betul Utopi (khayalan). Malahan perusahaan hutan yang



ada sekarang masih mengandung banyak kelemahan sebagaimana yang diharapkan. Akibat yang kemudian muncul adalah, masyarakat setempat yang biasanya hidup dengan produk non kayu mencari hutan baru diluar hutan konsesi. Masyarakat yang terkait dengan produk non kayu itu bisa saja mencari produk non kayu dari hutan lain atau mencari sumber mata pencaharian baru, akan tetapi dampak dari keputusan ini akan memberi “*multiplier effect*” yang negatif (Zerner, 1990 dalam Zakaria, 1994).

2. 2. Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya

2.2.1. Ruang Lingkup Konservasi

Konservasi sumberdaya alam bukanlah memelihara persediaan secara permanen tanpa pengurangan dan pengrusakan, karena jika demikian penggunaan sama dengan nol (Wantrup, 1986 dalam Suparmoko, 1997). Lebih lanjut dikemukakan oleh Suparmoko (1997), konservasi sering diartikan pengurangan atau peniadaan penggunaan, karena lebih mementingkan bentuk penggunaan yang lain dalam hal sumberdaya itu memiliki penggunaan yang bermacam-macam (*multiple use resource*). Sementara menurut Sinery (2015), yang dimaksud dengan konservasi adalah suatu upaya pengelolaan sumberdaya alam (meliputi sumberdaya hutan, tanah dan air).

Bila dikaitkan dengan sumberdaya hutan, Bratawinata (1997), menyatakan konservasi hutan adalah suatu kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan sumberdaya lestari, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan kerusakan kawasan hutan, hasil hutan dan kelestarian hutan.



Bila membahas konservasi sumberdaya hutan, maka terkait erat dengan kawasan konservasi yakni kawasan dimana konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan. Pengertian kawasan konservasi yang ditemukan dalam literatur yang ada dan digunakan oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung. Dimana kawasan konservasi ini ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Sembiring dkk, 1999).

Pemanfaatan hutan dan tanah hutan yang tidak diikuti tindakan konservasi akan menimbulkan perubahan ekosistem, yang berarti rusaknya keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini senada dengan Zain (1997), makna hutan sebagai bagian dari ekosistem sangat penting di dalam pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan usaha konservasi hutan sebagai bidang yang tercakup dalam tugas umum pembangunan. Menurut Suparmoko (1997), tindakan konservasi ini amat perlu khususnya bagi sumberdaya alam yang sifatnya tidak dapat pulih (*Non renewable resources*) dengan sendirinya. Tindakan konservasi bagi sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) dapat dilakukan dengan hati-hati, misalnya konservasi hutan dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih, reboisasi, dan penghijauan.

Sembiring, dkk. (1999), mengemukakan bahwa kawasan konservasi memiliki peran dan arti penting dalam kehidupan, karena ia memiliki nilai-nilai nyata dan intristik yang tak terhitung : ekologi, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik antara lain dengan menekankan desentralisasi dan peran serta masyarakat.

Di pihak lain seiring dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi, maka tekanan terhadap sumberdaya alam menjadi semakin besar, karena tingkat kebutuhan dan kepentingan terhadap sumberdaya alam juga semakin tinggi. Hal ini dapat diketahui betapa pembukaan hutan, kegiatan pertambangan dan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lain dari tahun ketahun bukannya menurun tetapi semakin besar. Dengan demikian kawasan eksploitasi tersebut kian terancam habis dan ancaman terhadap kawasan lindung atau kawasan konservasi pun terjadi (Sembiring, dkk,1999). Oleh karenanya dibutuhkan adanya berbagai program pembangunan nasional yang terkait dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai berikut (Aipassa, 2002) :

- 1) Program pengembangan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- 2) Program peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;
- 3) Program konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan;
- 4) Program pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- 5) Program penataan hukum dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2.2.2. Peran Serta Masyarakat Lokal dan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya

Masalah yang banyak dihadapi dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan melalui pembentukan kawasan konservasi diberbagai belahan dunia adalah adanya tekanan penduduk terhadap kawasan konservasi bersangkutan. Fenomena ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa, jauh sebelum kawasan-kawasan konservasi tersebut terbentuk, kawasan tersebut sebenarnya sudah berperan sebagai sumberdaya sosial-ekonomis dan sosial-kultural bagi masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitarnya, baik dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Kegagalan dalam menangkap “nilai” dan “makna” yang ada dalam proses interaksi itulah yang kemudian menjadi banyak kebijaksanaan dan program yang ada dalam suatu sistem pengelolaan kawasan konservasi tertentu tidak berjalan (Zakaria, 1994).

Hutan sebagai ekosistem, tidak hanya merupakan kumpulan vegetasi dan satwa. Di beberapa kawasan hutan, komponen manusia dalam hal ini masyarakat telah menjadi bagian yang integral dari hutan, bahkan turut menentukan eksistensi dari ekosistem yang ada. Karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka memanfaatkan hasil hutan dan atau lahan hutan (Sardjono dkk, 1998).

Von Maydell (1989) dalam Sardjono, dkk (1998), mengelompokkan masyarakat lingkungan hutan menjadi dua bagian besar yaitu :

- 1) Masyarakat di dalam kawasan hutan (*Forest dwellers*) yang dapat dikatakan sebagai komponen alami dari ekosistem hutan karena sudah

turun temurun tinggal di dalam hutan, meski tidak memiliki tempat tinggal tetap;

- 2) Masyarakat di lingkungan hutan (*rural people*), yang merupakan masyarakat yang tinggal secara tetap (“desa”), baik di dalam ataupun disekitar hutan.

Didalam kehutanan juga dikenal istilah masyarakat lokal (*local society*) dan istilah masyarakat lokal ini menurut Pranoto (2001), sering digunakan untuk masyarakat yang berada di dalam ataupun disekitar hutan. Poli (1997) dalam Sutrisno (2004), menyatakan bahwa masyarakat lokal adalah: (1). Sejumlah orang; (2). Tempat; (3). Cukup lama; sehingga menghasilkan; (4) *Common way of life*.

Menurut Simpoha (1998), yang dimaksud masyarakat lokal/setempat, yaitu kelompok masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar hutan dan berinteraksi dengan hutan sejak turun temurun. Mereka adalah masyarakat asli yang dikenal sebagai masyarakat hukum adat dan atau masyarakat adat. Masyarakat lokal/ setempat dapat terdiri dari :

- 1) Masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang teratur bersifat tetap, mempunyai keluasan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat;
- 2) Masyarakat adat yaitu masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka di mana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang



statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus;

- 3) Masyarakat campuran (termasuk pendatang), yang oleh karena perkembangan kemajuan sebagai negara kesatuan telah menyebabkan terjadinya perpindahan warga masyarakat dari tempat lain ke dalam dan di sekitar hutan, baik oleh karena program pemerintah (transmigrasi, permukiman kembali) maupun kehendak atau prakarsanya sendiri.

Soemarwoto (1987), menyatakan bahwa masyarakat lokal/tradisional secara umum mempunyai pola pikir yang imanen, dimana mereka memandang sumberdaya alam termasuk hutan di dalamnya tidak terpisahkan dari sistem sosial karena keduanya merupakan komponen ekosistem, pemanfaatan yang berlebihan apalagi merusak akan memusnahkan kehidupannya sendiri.

Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAHE) Nomor 5 tahun 1990 menegaskan, “konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat” (pasal 4). Artinya pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang setara. Tetapi kesetaraan tanggung jawab dan kewajiban tersebut tidak diikuti dengan kesamaan peran dalam pengelolaan kawasan-kawasan lindung (Kawasan konservasi) (Sangaji, 2002).

Lebih lanjut Sangaji (2002), menyatakan nasib peran serta rakyat, seperti diatur dalam pasal 37 UUKSDAHE No 5 tahun 1990, maka jauh lebih menyedihkan. Dalam ayat (1) disebutkan, peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan,

mengandung pengertian negatif, mengesankan rakyat sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa, tidak teratur dan pasif.

Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 (tentang Kehutanan) Pasal 70 dinyatakan: Ayat (1) masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan; Ayat (2), Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna; Ayat (3), dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu forum pemerhati kehutanan. Memperhatikan isi Pasal 70 tersebut di atas jelas sekali bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kehutanan sangat lah mendapat perhatian.

Disamping itu undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 2 menyatakan, bahwa penyelenggaraan kehutanan di Indonesia harus berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, keterbukaan dan keterpaduan. Pesan ini menunjukkan paradigma baru dalam penyelenggaraan kehutanan yang mewajibkan pengelolaan hutan yang mewajibkan pengelolaan hutan yang benar dalam berbagai hal, yaitu (Sutisna, 2000) :

- 1) Hutan fungsi manapun harus bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai fungsi hutan tersebut (lindung, produksi, konservasi);
- 2) Manfaat hutan bukan hanya dapat dinikmati masyarakat sesaat melainkan harus berkelanjutan. Baik dalam hal nilai ekonomis maupun nilai-nilai lainnya (estetika, ilmiah, budaya). Artinya bila ada kawasan hutan yang rusak, maka generasi sekarang berkewajiban memperbaikinya sampai menjadi produktif kembali dalam fungsi utamanya;



- 3) Penyelenggaraan kehutanan tidak dapat ditentukan dan atau dilakukan sepihak oleh pemerintah yang mewakili Negara seperti di masa lalu, melainkan harus bersama masyarakat secara berkeadilan terpadu.

2. 3. Partisipasi Masyarakat

2.3.1. Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat

Gross, dkk (1958), Berry (1995) dalam Mulyadi (2005); Sinery dan Manusawai (2016), mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Masih dalam pengertian yang sama Levinson yang dikutip Soekanto (1990), menyatakan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Keturtsertaan orang mengambil bagian atau memainkan suatu peranan dalam suatu bagian atau seluruh kegiatan pembangunan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, perolehan dan pembagian keuntungan, dan penilaian, disebut partisipasi masyarakat (Sallatang, 1987).

Adjid (1985), mengemukakan bahwa untuk memahami partisipasi, maka perlu terdapat beberapa kriteria yang tersimpul dalam istilah partisipasi itu sendiri yaitu:

- 1) Partisipasi mengacu kepada adanya beberapa subjek yang berinteraksi seperti individu, masyarakat, organisasi, perekonomian dan pemerintah yang masing-masing mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusan sendiri-sendiri tetapi dalam ikatan solidaritas tertentu.

- 2) Terdapat kesukarelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peranan yang diberikan organisasi secara ikhlas;
- 3) Partisipasi bermakna kepada keterlibatan anggota masyarakat dalam proses suatu kegiatan;
- 4) Adanya kelompok sasaran (target-target) dari suatu kegiatan yang menjadi ajang partisipasi.

Terdapat beberapa pengertian partisipasi (masyarakat) didasarkan pada berbagai sumber yang berbeda sebagai berikut :

- 1) Misra (1984) dalam Margiyono (1999), menyatakan apabila dikaitkan dengan upaya mendukung program pemerintah pengertian partisipasi adalah keterlibatan masyarakat bukan hanya dalam implementasi kegiatan, namun juga dalam pengambilan keputusan dan turut menikmati hasil keuntungan yang diperolehnya dari suatu program/proyek;
- 2) Sembiring, dkk (1999), menyatakan defenisi partisipasi bila dikaitkan dengan peranan masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat di dalam urusan pembangunan baik secara perorangan maupun dalam bentuk kelembagaan dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- 3) Canter (1997) dalam Pranoto (2001), defenisi partisipasi masyarakat adalah proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara penuh atas pengelolaan suatu kawasan.



Meningkatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat lokal berbeda peranannya, maka menurut Poli (1997) dalam Mulyadi (2005); Sinery dan Manusawai (2016) terdapat tiga aspek dalam pengertian partisipasi yaitu :

- 1) Luasnya partisipasi (siapa yang berpartisipasi); pemimpin saja, kelompok minat, keseluruhan rumah tangga, wanita, pemuda/anak-anak;
- 2) Fungsi partisipasi (dalam hal apa partisipasinya); apakah dalam hal distribusi/penggunaan, pemeliharaan, pelaksanaan, perencanaan atau manajemen;
- 3) Intensitas partisipasi (bagaimana partisipasinya); memberikan informasi, memberikan konsultasi, pengambilan keputusan, memprakarsai tindakan, pengendalian total.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang digunakan adalah pengertian partisipasi menurut Poli (1997) dalam Mulyadi (2005); Sinery dan Manusawai (2016) tersebut terakhir di atas.

2.3.2. Bentuk Partisipasi

Menurut Cormick (1979) dalam Sembiring, dkk (1999), partisipasi masyarakat berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu : Pertama, partisipasi yang bersifat konsultatif dimana anggota masyarakat punya hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, akan tetapi keputusan terakhir tetap ditangan pembuat kebijakan/keputusan; Kedua, partisipasi yang bersifat kemitraan dimana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan dan secara bersama-sama pula membuat keputusan.



Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Margiyono (1999), ada empat macam bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan (*decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan (*implementation*), partisipasi dalam menerima manfaat dan hasil-hasil pembangunan (*benefit*) dan partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan (*monitoring and evaluation*).

Tjokroamidjo (1987) dalam Margiyono (1999), membagi partisipasi dalam tiga bentuk yaitu: Pertama, partisipasi masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan bersama-sama pemerintah; Kedua, partisipasi dalam memikul bebandan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; Ketiga, partisipasi pada keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

2.3.3. Tingkat Partisipasi

Menurut Arnstein (1969) dalam Arimbi dan Santosa (1993), peran serta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapat keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat Tipologinya yang dikenal dengan; delapan tangga peran serta masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*). Selanjutnya Arnstein (1969) dalam Arimbi dan Santosa (1993) menjabarkan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non peranserta”, dengan menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan ; (1) Terapi; (2) Manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk “mendidik” dan



“mengobati” masyarakat yang berperan serta. Tangga ketiga, ke empat dan ke lima dikategorikan sebagai tingkat “Tokenisme” yaitu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Termasuk dalam tingkat “Tokenisme” adalah : (3) Penyampaian informasi (*informing*); (4) Konsultasi (*consultation*); dan (5) Peredaman kemarahan (*placation*). Selanjutnya Arnstein mengategorikan tiga tangga teratas dalam tingkat “kekuasaan masyarakat” (*citizen power*) masyarakat dalam tingkat ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan (6) Kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama penguasa atau pada tingkatan yang lebih tinggi, (7) Pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan (8) Pengawasan masyarakat (*citizen power*). Pada tingkat ketujuh dan kedelapan masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam pengambilan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijaksanaan tertentu.

2.3.4. Manfaat Partisipasi

Menurut Santosa dalam Sembiring, dkk (1999), partisipasi masyarakat memiliki beberapa manfaat utama diantaranya :

- a). Sebagai proses pembuatan kebijakan, karena masyarakat justru sebagai kelompok yang menanggung konsekuensi dari suatu kebijakan, memiliki hak untuk dikonsultasi (*right to consult*);

- b). Sebagai suatu strategi, dimana melalui partisipasi masyarakat suatu kebijakan pemerintah akan mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga keputusan memiliki kredibilitas (*credible*);
- c). Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan sebagai alat komunikasi bagi pemerintah yang dirancang untuk melayani masyarakat guna mendapatkan informasi dan masukan dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang responsif;
- d). Partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan konflik, didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dan pendapat yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Wisata Alam Sorong difokuskan pada Kelompok Tani Hutan Matoa KM14 Kampung Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Penentuan kampung tersebut didasarkan pada fokus pelaksanaan kegiatan pengelolaan oleh BBKSDA Papua Barat, selain pertimbangan adanya akses masyarakat yang secara langsung terhadap kawasan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan (Februari sampai Mei 2017).

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan objek-objek penting di lapangan yang terkait dengan ruang lingkup tesis guna mempermudah pembahasan;
2. Tape recorder/HP, digunakan untuk merekam informasi saat dilakukan wawancara sehingga dapat dipastikan tidak ada informasi responden yang hilang;
3. Alat dan bahan tulis menulis, kalkulator, dan komputer; digunakan untuk pengolahan data dan penyusunan tesis.
4. Kuisioner, digunakan untuk mendapatkan data primer dari responden yang merupakan data utama untuk dianalisa dalam penelitian ini;

5. Peta - peta serta dokumen-dokumen hasil penelitian terdahulu maupun berbagai laporan lainnya berkaitan dengan kawasan TWA Sorong, digunakan sebagai sumber informasi pendukung/sekunder.

3.3. Data Penelitian

Data dikumpulkan berdasarkan tujuan penelitian terdiri dari :

3.3.2. Data primer

Data primer yang digunakan adalah : (1) unsur masyarakat yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi; (2) keterlibatan masyarakat lokal pada fungsi dan intensitas partisipasi dan; (3) anggapan-anggapan masyarakat tentang partisipasi; (4) permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengelolaan TWA Sorong. Data Primer penelitian diperoleh langsung dari responden melalui kuisisioner dengan wawancara.

3.3.3. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari instansi terkait seperti pemerintah (Distrik Kepala Kampung, Dinas Kehutanan, BKSDA Papua Barat dan Bappeda Kota Sorong) serta lembaga-lembaga terkait. Jenis data berupa kondisi fisik, biologi dan kondisi sosial kawasan TWA Sorong.

3.4. Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan cara “*Stratified Sampling*” yaitu penentuan sampel yang dilakukan dengan membagi populasi dalam beberapa strata sesuai dengan tuntutan rumusan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Strata populasinya adalah a) pemimpin (*leader*),



b) kelompok minat (*interest group*), c) keseluruhan kepala keluarga (*all households*), d) wanita (*women*) dan e) pemuda (*youth*).



Gambar 1. Pengambilan Data Pada Responden Kelompok Masyarakat dan BBKSDA Papua Barat

Jumlah sampel responden untuk pemimpin (*leader*) adalah sebanyak 1 responden tokoh masyarakat, jumlah sampel untuk kelompok minat sebanyak 4 responden yang terdiri atas ketua, sekretaris dan 2 orang

anggota kelompok tani. Selanjutnya sampel responden kepala keluarga sebanyak 15 kepala keluarga (kk), 8 responden wanita , dan 9 responden pemuda.

3.5. Pengambilan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi; merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, sehingga dapat mendeskripsikan secara faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan.
2. Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dengan menggunakan kuisisioner yang telah disiapkan sebelumnya;
3. Studi dokumentasi; merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data tertulis melalui buku, gambar, foto atausejenisnya guna mendukung datayang diperoleh melalui observasi dan kuisisioner.

Secara garis besar, mengenai lingkup data penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penelitian

Tujuan Studi	Pokok bahasan	Data Kunci	Sumber Data Metode	Hasil yang Diharapkan
Deskripsi potensi masyarakat lokal dalam pengelolaan TWA Sorong	Kondisi Biogeofisik lokasi penelitian	Administrasi wilayah, iklim, tanah, topografi, vegetasi dan fauna	Data sekunder; pustaka, peta, dokumentasi, data statistik, dan observasi lapangan	Gambaran umum potensi lokasi penelitian
	Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat	Masyarakat ; Analisis peran, kelompok, jumlah, pendidikan, ciri budaya, bentuk permukiman, jumlah anggota keluarga, status kependudukan	Data primer; wawancara dengan responden	Gambaran kondisi masyarakat pada lokasi penelitian
Mengidentifikasi, optimalisasi fungsi dan tingkat partisipasi serta memberikan rumusan alternatif Peengelolaan TWA Sorong berbasis partisipasi	Faktor eksternal	Administrasi : Struktur organisasi, jasa pelayanan, tantangan kebijakan Ekonomi : Mata pencaharian, pendapatan (kebun, peternakan, perkebunan dan usaha lainnya)	Data sekunder ; pustaka, data statistik, foto Data primer; wawancara dengan responden	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan TWA Sorong
	Faktor internal	Kebijakan pemerintah (Perda, UU), kelembagaan, penerapan pengelolaan TWA Sorong berbasis partisipasi	Data sekunder ; pustaka, data statistik dan foto	Potensi dan prospek pengembangan program pengelolaan TWA Sorong

@Hak cipta pada UNIPA
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
 2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran akademik.





3.6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing data; setelah data terkumpul seluruhnya, maka dilakukan editing terhadap data yang merupakan kegiatan meneliti kembali data yang diperoleh;
2. Koding; yaitu mengklarifikasikan berdasarkan sumber responden dan mengklarifikasikan jawaban responden sesuai kategorinya;
3. menghitung frekwensi; setelah koding selesai dikerjakan maka baik sumber responden maupun jawaban responden dapat terdistribusi ke dalam kategori - kategori dan frekwensinya dapat dihitung;
4. Tabulasi; yakni proses penyusunan data dalam bentuk tabel sehingga data dapat dibaca dengan mudah dan maknanya mudah dipahami.

Penilaian tentang tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan program pengelolaan TWA Sorong, didasarkan pada perkalian angka indeks pelaku (*who*), dengan angka indek dalam hal apa (*what*) dan angka indeks bagaimana partisipasi (*how*), sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2. Participation-Empowerment index

Extent (Who)	Function (in What)	Intensity (how)
5. Children / youth	5. Management	5. Total Control
4. Women	4. Planning	4. Initiation Action
3. All households	3. Implementation	3. Decision Making
2. Interest group	2. Maintenance	2. Consultation
1. Leader only	1. Distribution / use	1. Informing

Sumber : Clarence Shubert, Pilo (2001) dalam Sinery dan Manusawai (2016)

Keterangan : angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah indeks.



Berdasarkan perkalian tersebut diperoleh angka tertinggi 125 dan angka terendah 1. Kemudian untuk memberikan skala penilaian tingkat partisipasi masyarakat lokal dari nilai terendah sampai tertinggi dengan pembagian kelompok sebanyak 5 kelompok dengan katagori; (a) sangat tidak aktif; (b) tidak aktif; (c) cukup aktif; (d) aktif dan; (e) sangat aktif, dilakukan dengan cara sebagai berikut (Sudjana, 1992) :

1. Menentukan rentang nilai dengan rumus :

$$\text{Rentang (R)} = \text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}$$

2. Menentukan banyaknya kelompok, dalam hal ini banyaknya kelas ditentukan sebanyak 5 kelompok sesuai kategori penilaian tersebut diatas.
3. Menentukan panjang kelas dengan rumus :

$$P = \frac{R}{K}$$

Keterangan : P = Panjang Kelas

R = Rentang

K = Banyaknya Kelompok

Dari rumus-rumus diatas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

$$R = 125 - 1 = 124$$

$$K = 5$$

$$P = 124 : 5 = 24,8 \text{ (dibulatkan menjadi 25)}$$

Dengan demikian pengkategorian partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan adalah sebagai berikut :



- 1). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria sangat aktif, jika nilai indeksnya 101 - 125;
- 2). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria aktif, jika nilai indeksnya 76 - 100;
- 3). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria cukup aktif, jika nilai indeksnya 51 - 75;
- 4). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria tidak aktif, jika nilai indeksnya 26 - 50;
- 5). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria sangat tidak aktif, jika nilai indeksnya 1 - 25.

Tahapan analisis adalah sebagai berikut :

1. Analisis masalah (*problem analysis*), yakni mengidentifikasi masalah-masalah dan sebab serta akibatnya berkenaan dengan suatu keadaan negatif yang ingin diperbaiki;
2. Analisis tujuan (*objective analysis*), yakni mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai akibat dari terpecahkannya masalah-masalah;
3. Analisis alternatif (*Alternative analysis*), yakni mengidentifikasi dan mengkaji kemungkinan pilihan strategi yang dapat mendukung keberhasilan program (proyek).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Umum Taman Wisata Alam Sorong

4.1.1. Sejarah Kawasan

Sejak tahun 1953 Pemerintah Hindia Belanda (BOSWEZEN) telah mengelola kelompok hutan antara Tanjung Sorong dan Sungai Warsamson yang terletak di Klasaman seluas 945,90 ha yang ditumbuhi berbagai jenis vegetasi hutan hujan tropis dataran rendah. Pada tahun 1954 dan 1959 pihak BOSWEZEN menanam pohon jenis *Agathis labillardieri*, *Podocarpus blumei*, *Araucaria cunninghamii* dan *Eucalyptus deglupta* seluas 200 ha, yang kemudian disebut sebagai Arboretum.

Pada tahun 1963, terjadi peralihan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda di Irian Jaya kepada Pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka hutan arboretum seluas 945,90 ha yang terletak di Klasaman tersebut beralih menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia. Sejak saat itu Pemerintah Republik Indonesia mengelola kawasan hutan tersebut dengan mempercayakan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong untuk mengurusnya sampai dengan tahun 1981.

Pada tahun 1981 Menteri Pertanian menunjuk kawasan hutan tersebut sebagai taman wisata dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 397/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Diantara TG Sorong dan Sungai Warsamson seluas \pm 945.90 Ha yang terletak di



Daerah TK II Sorong, Daerah TK I Irian Jaya Barat sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut kawasan hutan ini diberi nama Taman Wisata Sorong. Kemudian berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990 ada perubahan istilah Taman Wisata menjadi Taman Wisata Alam, sehingga penamaan Taman Wisata Sorong ini berubah menjadi Taman Wisata Alam Sorong.

Dalam perjalanannya TWA Sorong yang semula dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong beralih pengelolaannya kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelastarian Alam, Departemen Kehutanan, yang saat ini dikelola oleh Balai Besar KSDA Papua Barat (BBKSDA Papua Barat, 2014).

4.1.2. Pengukuhan Kawasan

Sejarah pengukuhan kawasan TWA Sorong diawali dengan pelepasan tanah adat. Sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 001/PTA/1977 tanggal 31 Januari 1977 pelepasan hak atas tanah tersebut dibuat oleh Harun Klagison, David Osok, Sephanus Malibela dan Edward Malaseme dengan penerima hak pelepasan atas tanah adalah Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sorong (saat itu dijabat oleh Bambang Warishadji SKB).

Pada tahun 1981, karena kelompok hutan antara TG Sorong dan Sungai Warsamson tersebut memiliki pemandangan yang indah, yang perlu dibina secara khusus untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata, maka Menteri Pertanian menunjuknya sebagai hutan dengan



fungsi taman wisata (Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 397/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut, pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 1981, Bupati Kepala Daerah TK II Sorong (saat itu dijabat oleh Bapak Sutadji) selaku Ketua Panitia Tata Batas dibantu oleh Tim Tata Batas dari Balai Planologi Kehutanan VI Maluku dan Irian Jaya melakukan penataan batas Kawasan TWA Sorong. Dalam penataan batas ini berhasil dibuat jalur batas TWA Sorong sepanjang 13.737,1 meter (13,737 km) yang ditandai dengan pal batas yang terbuat dari beton cor bertulang dengan perbandingan bahan pasir dan semen 3 : 1, dengan ukuran 10 X 10 X 180 cm sebanyak 110 buah yang diberi kode $\frac{B}{1}$ sampai $\frac{B}{110}$. (BBKSDA Papua Barat, 2014).

4.1.3. Letak dan Luas

Kawasan TWA Sorong terletak pada koordinat 0°51'– 0°58' Lintang Selatan dan 131°21'–131°19' Bujur Timur, berdasarkan administrasi pemerintahan kawasan ini masuk dalam wilayah Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dalam pengelolaannya kawasan ini berada di bawah tanggung jawab Seksi Konservasi Wilayah II Teminabuan, Bidang KSDA Wilayah I Sorong, Balai Besar KSDA Papua Barat.

Kawasan TWA Sorong ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 397/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan luas 945,9 Ha.

Batas-batas kawasan TWA Sorong adalah sebagai berikut :



- a). Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK),
- b). Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL),
- c). Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK),
- d). Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL).

4.1.4. Iklim

TWA Sorong yang terdapat di Kota Sorong merupakan wilayah dengan iklim tropis. Letak geografis Kota Sorong yang berada di bawah garis khatulistiwa menjadikan wilayah ini beriklim tropika basah dengan suhu rata-rata relatif stabil.

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Sorong pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut, suhu udara minimum di Kota Sorong sekitar 23,2° Celcius, dan suhu udara maksimum sekitar 32,6° Celcius. Curah hujan tercatat 2.911 milimeter. Curah hujan cukup merata sepanjang tahun, tidak terdapat bulan tanpa hujan. Banyaknya hari hujan setiap bulan antara 12 – 27 hari, kelembaban udara rata-rata 87 persen.



Tabel 3. Suhu, Kelembaban Udara dan Hari Hujan di Kota Sorong

No.	Bulan	Suhu Udara Rata-Rata(°C)	Kelembaban Udara(%)	Hari Hujan Rata-rata	Intesitas Penyinaran Matahari (%)
1.	Januari	27.9	84	19,3	53,35
2.	Februari	27.4	85	14,0	59,65
3.	Maret	27.3	84	14,3	66,65
4.	April	27.5	85	19,3	45,3
5.	M e i	27.6	87	15,0	66,1
6.	Juni	26.8	87	21,0	65,4
7.	Juli	27.0	88	19,3	55,8
8.	Agustus	25.9	83	15,3	61,6
9.	September	26.4	90	17,0	52,1
10.	Oktober	26.8	87	16,7	60,6
11.	November	27.1	88	14,7	50,9
12.	Desember	27.4	88	17,7	47,3
Rata-Rata		27.1	89	17,0	57,1

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Sorong

4.1.5. Topografi

Kawasan TWA Sorong memiliki topografi datar sampai bergelombang dengan kelas kelerengan datar seluas 520,10 Ha dan kelas kelerengan bergelombang seluas 425,8 Ha. Kondisi kelas lereng dan luasan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kondisi Kelas Lereng Kawasan TWA Sorong

No.	Kelas Lereng	Luas (Ha)
1.	Datar (0 – 8%)	520,10
2.	Bergelombang (8 – 15 %	425,80



4.1.6. Geologi dan Tanah

Geologi kawasan TWA Sorong tersusun oleh batuan formasi Klasaman. Jenis tanah yang terdapat di TWA Sorong adalah Aquaents, Aquaeps, Hemits seluas 315,6 Ha dan Udults, Udepts, Aquts seluas 630,3 Ha.

Geologi kawasan TWA Sorong tersusun oleh batuan formasi Klasaman. Jenis tanah di kawasan TWA Sorong secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kondisi TWA Sorong Berdasarkan Jenis Tanah

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1.	Aquaents, Aquaeps, Hemist	315,6
2.	Udults, Udepts, Aqupts	630,3

4.1.7. Hidrologi

Terdapat dua sumber air di TWA Sorong yang berperan dalam hidrologi di dalam kawasan :

- Air hujan, adanya hujan tiap bulan menunjukkan bahwa ketersediaan air hujan yang merupakan sumber air permukaan maupun air tanah ada sepanjang bulan.
- Air permukaan, sumber air permukaan di kontribusi oleh anak sungai yang mengalir di dalam kawasan.

Secara umum kawasan TWA Sorong termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Remu/Sorong. Setidaknya terdapat 4 anak sungai yang mengalir di



kawasan TWA Sorong, yaitu: Sungai Klawulu, Sungai Klasege, Sungai Pletok, dan Sungai Kalabeling.

4.1.8. Sosial Ekonomi dan Budaya

Jumlah penduduk Distrik Sorong Timur sebanyak 27.032 jiwa yang terbagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu kelurahan Klawuyuk, Klasaman, Klawalu, Klamana, Klalim, Giwu dan Klasuat untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Distrik Sorong Timur

Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
Klawuyuk	17.02	9710	5088	4622	2341
Klasaman	25.47	6120	3248	2872	1292
Klawalu	19.16	5286	3042	2244	942
Klamana	24.23	4127	2134	1993	922
Klalim	20.14	1110	597	513	243
Giwu	30.63	516	266	250	92
Klasuat	21.57	163	82	81	68

Sumber: BPS Kota Sorong, 2016.

Nama Sorong yang menjadi nama wilayah Kota dan Kabupaten Sorong sekarang ini, menurut satu versi berawal dari nama perusahaan Belanda yang mengeksploitasi minyak di wilayah ini, *Seismic Ondersub Oil Niew Guinea*, yang disingkat menjadi Sorong. Namun menurut versi yang lain, kata Sorong berarti “laut terdalam” yang diambil dari bahasa suku Biak, karena orang



Biaklah yang pertama kali menemukan daerah Sorong sebelum Belanda tiba di Tanah Papua (Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Letak Sorong yang tepat berada di Kepala Burung Pulau Papua menjadikan daerah ini strategis sebagai arus perdagangan dan pintu gerbang Papua dalam interaksinya dengan dunia luar. Berbagai daerah yang berada di selatan dari pulau Papua merasakan manfaat keberadaan kota ini. Kabupaten Manokwari dan Fakfak, Bintuni, Babo, dan sekitarnya menjadikan Sorong sebagai transit pengangkutan barang. Posisinya ini menjadikan kota Sorong tergolong cukup dinamis.

Masyarakat asli Sorong adalah suku Moi (suku ini memiliki empat sub-suku). Secara umum, kehidupan suku Moi hampir dapat dikatakan sama dengan suku lainnya yang terdapat di Papua, kecuali selain bahasa juga tradisi-tradisi tertentu saja yang berbeda. Selain masyarakat Moi juga terdapat masyarakat Bugis, Buton, Makasar, Jawa, Sunda, Sumatera, sebagai transmigran yang membawa agama Islam ke tanah Papua sehingga Masjid, musholla, madrasah cukup mudah dijumpai di kota Sorong.

4.1.9. Estetika

Keanekaragaman flora dan fauna merupakan suatu keindahan yang dapat dinikmati. Pada pagi hari kicauan burung terus bersautan sehingga membawa kedamaian bagi pengunjung. Selain itu kawasan hutan yang relatif rapat membuat iklim mikro yang ada di dalam TWA Sorong menjadi nyaman untuk dikunjungi.

Kawasan TWA Sorong merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan dataran rendah dan di dalamnya terdapat hutan tanaman Damar (*Agathis*



labillardieri) dan *Aracauria* spp. yang tertata cukup rapih. Dalam kawasan ini tercatat 53 jenis vegetasi berkayu yang biasa tumbuh pada hutan dataran rendah, seperti; matoa (*Pometia* sp), merbau (*Intsia bijuga*), medang, angšana, amugia, lansat, cempedak, rambutan, mangga dan jenis lainnya.

Beberapa jenis satwa yang terkadang masih dijumpai dalam kawasan hutan wisata ini antara lain: kakatua putih jambul kuning (*Cacatua galerita triton*), nuri merah kepala hitam (*Lorius lory*), rusa (*Cervus timorensis*), kanguru pohon (*Dendrolagus* sp), julang papua (*Rhyticeros plicatus*), bayan (*Eclectus roratus*) dan lain jenis lainnya.

4.2. Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) yang terdiri dari Suaka Margasatwa dan Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan raya menurut PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 mengarahkan bahwa kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan. Para pihak sebagaimana dimaksud, antara lain : Pemerintah Pusat termasuk Kepala UPT KSDA/TN, Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat



setempat, Perorangan baik dari dalam maupun luar negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, nasional, dan internasional yang bekerja di bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati, BUMN, BUMD, BUMS, atau Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan.

Menurut Sallatang (1987) dan Sinery dkk (2015) dalam penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan, pada tahap pelaksanaan masyarakat relatif berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk, antara lain yang penting adalah mengikuti penerangan, menjadi peserta obyek dan memanfaatkan keuntungan ekonomi. Namun biasanya jumlah warga yang berpartisipasi belum memadai. Di pihak lain, pada tahap perencanaan dan penilaian pada umumnya masyarakat tidak berpartisipasi dengan alasan tidak dilibatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BBKSDA Papua Barat, diketahui bahwa program pengelolaan yang dilakukan dalam rentang waktu 2013 sampai saat ini (mendekati pertengahan tahun 2017) ada 13 kegiatan yang dilakukan baik program yang dilakukan secara langsung oleh BBKSDA Papua Barat maupun oleh mitra BBKSDA Papua Barat. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya secara keseluruhan telah melibatkan masyarakat di kawasan Taman Wisata Alam Sorong baik pemimpin, kelompok minat, kepala keluarga maupun kelompok perempuan dan kelompok pemuda.

Secara umum keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong pada fungsi partisipasi khususnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pengelolaan oleh BBKSDA Papua Barat ditentukan motivasi masyarakat untuk perubahan. Perubahan dimaksud dalam hal perubahan

ekonomi rumah tangga dan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan akibat pembangunan. Hal ini merupakan suatu bentuk kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan program pengelolaan karena akan menumbuhkan pengalaman dan rasa memiliki yang pada tahap berikutnya akan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk mempertahankan kawasan Taman Wisata Alam ini sebagaimana terlihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Fungsi Partisipasi Kelompok Tani Matoa dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong

No	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Jumlah Responden	Persen (%)
1.	Management	1	2,70
2.	Planning	3	8,11
3.	Implementation	14	37,84
4.	Maintenance	10	27,03
5.	Distribution / use	9	24,32
Jumlah responden berpartisipasi		37	100,00
Jumlah responden tidak berpartisipasi		0	0,00
Jumlah		37	100,00

Keterangan :

1. Keikutsertaan dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, memprakarsai tindakan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi.
2. Keikutsertaan dalam manajemen program khususnya perencanaan kegiatan khususnya kegiatan penyusunan rencana induk pemberdayaan kampung.
3. Keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan program peternakan ayam dan persemaian
4. Keikutsertaan dalam mendukung keberhasilan program khususnya program bank sampah melalui pengumpulan sampah plastik dalam kawasan TWA.
5. Pengguna program pengelolaan kawasan khususnya kegiatan pelatihan baik Pelatihan Budidaya Anggrek, Pemandu Wista Alam, Pelatihan Pemadam Kebakaran, Pelatihan Teknis Pembibitan, Pelatihan Perbanyak Tanaman Vegetatif, Pelatihan Pertanian dalam Polibag dan Pelatihan Interpreter Wisata Alam

Berdasarkan data hasil penelitian sebagaimana terlihat pada Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa semua responden turut serta dalam pelaksanaan program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong yang menunjukkan adanya kinerja pengelola yang cukup baik dalam implementasi program. Selain itu, adanya latar belakang masyarakat yang merupakan kelompok tani hutan yang tentu saja sangat bergantung kepada penyelenggaraan program yang dilakukan oleh BBKSDA Papua Barat dan mitra.

Partisipasi kelompok tani hutan Matoa Kampung Klasaman dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Sorong berdasarkan fungsi partisipasi tertinggi pada fungsi implementasi (pelaksanaan kegiatan) dengan jumlah responden sebanyak 14 responden (37,84 %). Fungsi tersebut terlihat dalam pelaksanaan kegiatan peternakan ayam dan kegiatan persemaian. Selanjutnya fungsi maintenance (pemeliharaan) dalam program bank sampah melalui pengumpulan sampah plastik dalam kawasan Taman Wisata Alam Sorong oleh masyarakat dengan jumlah responden 10 responden (27,03%). Fungsi Distribution / use melalui kegiatan pelatihan baik pelatihan budidaya anggrek, pemandu wisata alam, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan teknis pembibitan, pelatihan perbanyakan tanaman vegetatif, pelatihan pertanian dalam polibag dan pelatihan interpreneur wisata alam dengan jumlah responden sebanyak 9 orang (24,32%). Fungsi planning (perencanaan) melalui kegiatan penyusunan rencana induk pemberdayaan kampung dengan jumlah responden sebanyak 3 orang (8,11%), sedangkan fungsi manajemen yang mencakup kegiatan memberikan informasi,



konsultasi, pengambilan keputusan, memprakarsai tindakan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi hanya 1 responden (2,70%).

Kondisi tersebut sedikit berbeda dengan partisipasi masyarakat pada hutan lindung Wosi Rendani yang menunjukkan bahwa konsentrasi responden lebih banyak diidentifikasi pada fungsi distribution / use dan implementation (Sinery dan Manusawai, 2016). Namun demikian, fungsi partisipasi masyarakat di hutan lindung Wosi Rendani tidak mencakup fungsi manajemen dan fungsi perencanaan sebagaimana yang diidentifikasi pada partisipasi masyarakat di TWA Sorong. Hal tersebut terkait dengan kondisi masyarakat yang merupakan kelompok tani hutan sehingga pengelolaan program lebih merata dan melibatkan semua anggota kelompok tani. Selanjutnya pengelolaan program umumnya dibangun dari suatu perencanaan secara bersama sampai pada pelaksanaan dan bahkan sampai evaluasi. Menurut Sallatang (1987) dalam Sutrisno (2004) dalam penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan, pada tahap pelaksanaan masyarakat relatif berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk, antara lain yang penting adalah; mengikuti penerangan, menjadi peserta obyek dan memanfaatkan keuntungan ekonomi. Namun biasanya jumlah warga yang berpartisipasi belum memadai. Dipihak lain, pada tahap perencanaan dan penilaian pada umumnya masyarakat tidak berpartisipasi dengan alasan tidak dilibatkan.

Gambaran secara rinci tentang kualitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong yang tergambar melalui intensitas partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.



Tabel 8. Intensitas Partisipasi Kelompok Tani Hutan Matoa dalam Program Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong

No	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Jumlah Responden	Persen (%)
1.	Total Control	4	10,81
2.	Initiation Action	8	21,62
3.	Decision Making	8	21,62
4.	Consultation	7	18,92
5	Informing	14	37,84
Jumlah responden berpartisipasi		37	100,00
Jumlah responden tidak berpartisipasi		0	0,00
Jumlah		37	100,00

Keterangan:

1. *Pengendalian keseluruhan, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan demi kesuksesan program pengelolaan TWA Sorong.*
2. *Memprakarsai tindakan, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam bentuk inisiatif tindakan demi terlaksananya program pengelolaan TWA Sorong*
3. *Pengambilan keputusan, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam menentukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam program pengelolaan TWA Sorong;*
4. *Memberikan konsultasi, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul berkenaan dengan program pengelolaan TWA Sorong;*
5. *Memberikan informasi, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan program pengelolaan TWA Sorong;*

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana terlihat pada Tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Sorong berdasarkan intensitas partisipasi mencakup semua bentuk partisipasi. Intensitas partisipasi dalam bentuk Informing (memberikan informasi) merupakan bentuk partisipasi tertinggi dengan jumlah responden sebanyak 14

responden (37,84%). Selanjutnya diikuti initiation action (memprakarsai tindakan) dan decision making (pengambilan keputusan) masing-masing dengan 8 responden (21,62%), serta consultation (pemberian konsultasi) sebanyak 7 responden (18,92%), sedangkan intensitas partisipasi terendah sebanyak 4 responden (10,81%) pada bentuk partisipasi total control (pengendalian keseluruhan). Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam intensitas partisipasi terdistribusi hampir merata, walaupun terjadi perbedaan pada total control (pengendalian keseluruhan) dan informing (memberikan informasi).

4.2.1 Fungsi dan Intensitas Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa fungsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong berada pada semua fungsi partisipasi, sebagaimana terlihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Fungsi dan Intensitas Partisipasi Unsur Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong

Bentuk Partisipasi	Responden					Jumlah
	Pemimpin	Minat	Kepala Keluarga	Ibu Rumah Tangga	Pemuda	
Management	-	1	-	-	-	1
Planning	-	3	-	-	-	3
Implementation	1	-	6	7	-	14
Mainaintenance	-	-	9	1	-	10
Distribution	-	-	-	-	9	9
Jumlah	1	4	15	8	9	37
Persen (%)	2,70	10,81	40,54	21,62	24,32	100,0
Total Control	1	2	1	-	-	4
Initiation Action	-	1	2	2	3	8
Decision Making	-	1	5	2	-	8
Consultation	-	-	1	3	3	7
Informing	-	-	6	1	3	10
Jumlah	1	4	15	8	9	37
Persen (%)	2,70	10,81	40,54	21,62	24,32	100,0

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong tertinggi pada kelompok keluarga (15 responden atau 40,54%) dan terendah adalah kelompok pemimpin (1 responden atau 2,70%). Demikian halnya dengan intensitas partisipasi masyarakat, yang mana unsur kepala keluarga merupakan kelompok tertinggi dengan jumlah responden sebanyak 15 orang atau 40,54% dan terendah adalah kelompok pemimpin (1 responden atau 2,70%).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa baik pada fungsi partisipasi maupun intensitas partisipasi kelompok keluarga merupakan kelompok yang paling banyak berpartisipasi dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong yang menunjukkan kondisi normal dalam stratifikasi sosial masyarakat. Menurut Sardjono (2004) kelompok keluarga dalam hal ini kepala keluarga merupakan anggota keluarga yang paling pertama menerima inovasi selanjutnya akan terlibat dalam pengelolaan inovasi. Menurut Sinery (2013) dan Sinery dan Manusawai (2016) walaupun ada perbedaan dalam akses terhadap sumber daya alam, namun kepala keluarga menjadi tumpuan utama masyarakat dalam menerima suatu inovasi/program/kegiatan yang selanjutnya diimplementasikan. Lebih jauh disebutkan bahwa kondisi ini menjadi karakter masyarakat yang masih menggantungkan kehidupannya terhadap sumber daya alam.



a. Unsur Pemimpin

Data hasil analisis sebagaimana terlihat pada Tabel 9 menunjukkan, bahwa unsur masyarakat pemimpin yang berpartisipasi dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong hanya 1 responden (2,70%) yang terlibat pada fungsi partisipasi “implementation/pelaksanaan”, demikian pada intensitas partisipasi hanya 1 responden (2,70%) dengan bentuk partisipasi “total kontrol”.

Berdasarkan karakter masyarakat, di lokasi penelitian sehingga ditetapkan unsur pemimpin dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat demikian halnya dengan kepala kampung dan kepala suku memiliki kemampuan yang baik dalam mengarahkan masyarakat sehingga menjadi panutan dalam program pengelolaan khususnya implementasi program kegiatan. Menurut Margiyono (1999) lurah (kepala kampung) selaku pemimpin di kelurahan (kampung) bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya kepala kampung dalam menjalankan tugas harus mensukseskan setiap program pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya tokoh masyarakat yang dimaksud di atas terdiri atas guru, guru jemaat yang memiliki karismatik pemimpin sehingga selalu dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan. Tokoh masyarakat selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan, sehingga setiap program pembangunan mendapat dukungan dari masyarakat.



b. Unsur Minat

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana terlihat pada Tabel 9 menunjukkan bahwa kelompok minat yang terlibat dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong terdiri 4 responden yang merupakan kelompok tani hutan. Partisipasi unsur masyarakat kelompok minat pada program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong difokuskan pada fungsi partisipasi “manajemen” sebanyak 1 respondendan (25%), fungsi partisipasi “perencanaan” sebanyak 3 responden (75%). Selanjutnya intensitas partisipasi unsur masyarakat kelompok minat pada intensitas partisipasi “pengendalian keseluruhan” sebanyak 2 responden (50%) dan “memprakarsai tindakan” sebanyak 1 responden (25%) serta partisipasi “pengambilan keputusan” 1 responden (25%).

Kelompok minat adalah unsur dari masyarakat yang berpartisipasi secara aktif pada program pembangunan karena kelompok minat umumnya lebih dekat dengan program yang dilakukan atau diminati. Kelompok minat umumnya sebagai suatu organisasi yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri mestinya keberadaannya dapat dijadikan penggerak bagi keberhasilan suatu program. Namun kenyataan di lapangan sering terjadi kelompok minat terbentuk secara tidak alami, tetapi lebih karena untuk persyaratan tertentu (Margiono, 1999).

c. Kepala keluarga

Berdasarkan data hasil analisis sebagaimana terlihat pada Tabel 9 menunjukkan, bahwa partisipasi masyarakat kepala keluarga pada program

pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong pada fungsi partisipasi sebanyak 15 responden yang berperan aktif pada fungsi partisipasi “pelaksanaan kegiatan”, sebanyak 6 responden (40,0%), dan fungsi “perbaikan/pemeliharaan” 9 responden (60,0%). Selanjutnya intensitas partisipasi unsur masyarakat kelompok keluarga terdistribusi pada semua bentuk partisipasi. Unsur keluarga yang berpartisipasi pada intensitas partisipasi “pengendalian keseluruhan” sebanyak 1 responden (6,6%), selanjutnya memprakarsai tindakan sebanyak 2 responden (13,3%), berpartisipasi dalam “pengambilan keputusan” sebanyak 5 responden (33,3%), berpartisipasi dalam “memberikan konsultasi” sebanyak 1 responden (6,6%) dan berpartisipasi dalam “memberikan informasi” sebanyak 6 (40,0%).

Kepala keluarga (kelompok rumah tangga) merupakan unsur masyarakat terbesar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan dibandingkan unsur masyarakat lainnya. Partisipasi aktif dari keseluruhan kelompok rumah tangga dalam setiap program pembangunan merupakan prasyarat bagi keberhasilan penyelenggaraan program. Hal tersebut karena kelompok keluarga merupakan basis terdepan dalam struktur masyarakat yang memungkinkan terlaksananya program. Margiono, (1999) mengemukakan bahwa kelompok pemimpin rumah tangga merupakan kelompok yang berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan dan dalam berbagai hal sehingga selalu dilibatkan.



d. Unsur Perempuan (Ibu Rumah Tangga)

Partisipasi unsur masyarakat wanita dalam hal ini unsur ibu rumah tangga dalam program pembangunan khususnya pada program pengelolaan (perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta pemberdayaan masyarakat) Taman Wisata Alam Sorong merupakan salah satu unsur penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program konservasi.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana terlihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa fungsi partisipasi unsur masyarakat wanita (ibu rumah tangga) pada program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong sebanyak 8 responden, terdiri atas 7 responden (87,5%) berperan pada fungsi partisipasi “pelaksanaan program” dan 1 responden pada fungsi partisipasi “perbaikan atau pemeliharaan” (12,5%). Selanjutnya intensitas partisipasi unsur ibu rumah tangga pada intensitas partisipasi seperti halnya unsur kepala keluarga mencakup semua bentuk partisipasi. Intensitas partisipasi dimaksud terdiri atas 1 responden (14,2%) berpartisipasi pada intensitas partisipasi “pengendalian keseluruhan”, 2 responden (28,57%), berpartisipasi pada “memprakarsai tindakan”, sebanyak 2 responden (28,57%), berpartisipasi pada intensitas partisipasi “memberikan konsultasi” dan 1 responden (14,2%) berpartisipasi pada intensitas partisipasi “memberikan informasi”.

e. Unsur Pemuda

Kelompok pemuda merupakan salah unsur penting seperti unsur masyarakat lainnya yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan. Menurut Soelaeman (1998) peranan pemuda dalam masyarakat dan bangsa telah digariskan dalam GBHN, satu diantaranya adalah generasi muda (pemuda) merupakan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Menurut Sinery dan Manusawai (2016) unsur pemuda merupakan unsur penggerak penyelenggaraan program bila dikelola secara baik dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya disebutkan lebih jauh bahwa bila unsur pemuda tidak dikelola secara baik (dalam hal ini proses pendampingan dan sosialisasi) maka pemuda cenderung pasif dan kurang terlibat dalam penyelenggaraan program pengelolaan.

Upaya mewujudkan keberhasilan program pengelolaan secara berkelanjutan, maka pemuda harus dijadikan salah satu pelaku pembangunan. Partisipasinya dalam program pembangunan akan mengantarkan pada kesinambungan pembangunan, karena di dalamnya akan terjadi proses pengenalan, pembelajaran dan pemahaman dari segala sesuatu yang terkait dengan program dan akan membangkitkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini juga yang diduga berlaku pada partisipasi unsur pemuda dalam hubungannya dengan pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana terlihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa fungsi partisipasi unsur masyarakat pemuda pada program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong adalah sebanyak 9 responden (100,0%) berperan dalam fungsi partisipasi distribusi atau pengguna program pengelolaan. Selanjutnya pada intensitas partisipasi sebanyak 3 responden (33,3%) berpartisipasi pada intensitas partisipasi “memprakarsai tindakan”, 3 responden (33,3%) berpartisipasi pada intensitas partisipasi “memberikan konsultasi” dan 3 responden (33,3%) berpartisipasi pada intensitas partisipasi “memprakarsai informasi.

4.2.2 Tingkat Partisipasi dan Persepsi Unsur Masyarakat

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

a. Unsur pemimpin

Berdasarkan data hasil analisis sebagaimana ditampilkan pada Tabel 9, diketahui bahwa keseluruhan unsur masyarakat pemimpin yang berpartisipasi terdiri dari 1 responden (100%) pada fungsi partisipasi “pelaksanaan”, selanjutnya pada intensitas partisipasi 1 responden (100%) pada bentuk partisipasi “pengendalian keseluruhan”. Jika ditabulasi dalam tabel “*Participation Empowerment Index*”, maka diperoleh tingkat partisipasi unsur pemimpin sebesar, yakni $1 \times 3 \times 5 = 15$ yang menunjukkan bahwa partisipasi pemimpin dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong masuk dalam kategori “sangat tidak aktif” (pada rentang nilai 1 - 25).

b. Unsur kelompok minat

Fungsi partisipasi masyarakat unsur minat pada program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong adalah sebanyak 1 responden (25%) pada fungsi partisipasi “manajemen” dan 3 responden (75%) pada fungsi partisipasi “perencanaan”. Selanjutnya intensitas partisipasi masyarakat unsur minat sebanyak 2 responden (50%) pada intensitas “pengendalian keseluruhan”. Jika ditabulasi dalam tabel “*Participation Empowerment Index*”, diperoleh tingkat partisipasi unsur kelompok minat $2 \times 5 \times 5 = 50$ yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat unsur minat dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong masuk dalam kategori “tidak aktif” (pada rentang nilai 26 - 50).

c. Unsur kepala keluarga

Fungsi partisipasi unsur masyarakat kepala keluarga (kelompok rumah tangga) pada program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong sebanyak 6 responden (40,0%) pada fungsi partisipasi “pelaksanaan kegiatan”, dan 9 responden (60,0%) pada fungsi partisipasi “perawatan/pemeliharaan”. Selanjutnya intensitas partisipasi unsur kepala keluarga dengan 6 responden (40,0%) pada intensitas partisipasi “pemberian informasi” dan 5 responden (33,33%) pada intensitas partisipasi “pengambilan keputusan”. Jika dituangkan dalam tabel “*Participation Empowerment Index*”, diperoleh bahwa tingkat partisipasi unsur masyarakat kepala keluarga yaitu $3 \times 3 \times 3 = 27$ dan $3 \times 2 \times 1 = 6$, sehingga partisipasi kelompok kepala keluarga dalam program



pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong masuk dalam kategori “tidak aktif” dan “sangat tidak aktif”. Mempertimbangkan penyebaran jumlah responden berdasarkan fungsi dan intensitas partisipasi (jumlah responden terbanyak pada fungsi “perbaikan atau pemeliharaan”, maka tingkat partisipasi masyarakat unsur kepala keluarga masuk dalam kategori “sangat tidak aktif”(pada rentang nilai 1 – 25).

d. Unsur Wanita (Ibu Rumah Tangga)

Partisipasi unsur masyarakat wanita (ibu rumah tangga) pada program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong sebanyak 7 responden (87,5%) pada fungsi partisipasi “pelaksanaan kegiatan”, dengan intensitas partisipasi sebanyak 3 responden (37,5%) pada intensitas partisipasi “memberikan konsultasi”. Jika ditabulasi dalam tabel “Participation Empowerment Index” diperoleh tingkat partisipasi unsur ibu rumah tangga sebesar $4 \times 3 \times 2 = 24$, sehingga tingkat partisipasi unsur masyarakat wanita dalam program Taman Wisata Alam Sorong masuk dalam kategori “sangat tidak aktif” (berada pada rentang nilai 1 – 25).

e. Unsur pemuda

Partisipasi unsur masyarakat pemuda dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong adalah sebanyak 9 responden (100%) pada fungsi partisipasi “memberikan pelayanan distribusi”. Selanjutnya pada intensitas partisipasi sebanyak 3 responden (33,33%) pada intensitas partisipasi “memprakarsai tindakan”, 3 responden (33,33%) pada intensitas partisipasi “memberikan konsultasi” dan 3 responden (33,33%)



pada intensitas partisipasi “memberikan informasi”, sehingga tingkat partisipasi kelompok pemuda dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong adalah $5 \times 1 \times 4 = 20$ atau $5 \times 1 \times 2 = 10$ atau $5 \times 1 \times 1 = 5$ yang menunjukkan bahwa partisipasi kelompok pemuda masuk dalam kategori “sangat tidak aktif” (berada pada rentang nilai 1 – 25).

Bentuk partisipasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong diketahui bahwa tingkat partisipasi termasuk kategori tidak aktif dan “sangat tidak aktif” yang menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat termasuk rendah yang akan berdampak pada ketidakberhasilan program konservasi selanjutnya. Menurut Margiono (1999), seluruh unsur masyarakat seharusnya terlibat secara aktif dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan karena tanpa keterlibatan (partisipasi) aktif masyarakat keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan sangat tidak mungkin dicapai, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan dan bahkan kegagalan bagi pembangunan itu sendiri.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi

Secara prinsip keberhasilan implementasi program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong sangat dipengaruhi tingkat adopsi /penerimaan program oleh masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan proses adopsi umumnya terlihat dari berpartisipasi dan tidak berpartisipasi masyarakat terhadap program atau kegiatan.



Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tercantum pada Tabel 10, diketahui ada perbedaan pandangan, penilaian dan tanggapan antara masyarakat yang berpartisipasi dalam program pengelolaan TWA Sorong. Masyarakat berpandangan bahwa : (1) partisipasi adalah merupakan peran serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan. Menurut Slamet (1994), berdasarkan cara keterlibatannya partisipasi langsung terjadi bila diri orang itu menampilkan kegiatan di dalam proses partisipasi. Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya; (2) Partisipasi adalah ikut terlibat dalam berbagai tahap kegiatan pembangunan. Selanjutnya menurut Slamet (1994), merupakan pandangan yang didasarkan pada keterlibatan dalam berbagai tahap pembangunanyang terencana. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa ada 6 (enam) tahap proses dalam pembangunan, yaitu : (1) perumusan tujuan; (2) penelitian; (3) persiapan rencana; (4) penerimaan rencana; (5) pelaksanaan dan (6) penilaian. Di sebut partisipasi lengkap bila seseorang baik secara langsung maupun tak langsung terlibat dalam dalam seluruh tahapan(6 tahap), dan disebut partisipasi sebagian, bila seseorang baik secara langsung maupun tak langsung seseorang terlibat dalam sebagian tahapan dari 6 tahapan tersebut.

Pandangan lain bahwa partisipasi adalah sumbangan yang bersifat moril dan material, yang menurut Kartodirdjo (1988), partisipasi diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan, sebagai sumbangan atau kontribusi (*counterfund*) masyarakat

kepada proyek pemerintah. Hal ini yang saat ini menjadi tren dalam kalangan beberapa kelompok masyarakat sebagaimana dikemukakan Sinery dan Manusawai (2016), yaitu bahwa ada tren partisipasi itu menjadi sangat tinggi ketika ada keuntungan secara konkrit dari suatu inovasi atau kegiatan yang dilakukan.

3. Alasan Berpartisipasi

Secara keseluruhan dalam implementasi program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong terdapat berbagai pendapat mengapa masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Pendapat Masyarakat Terhadap Berpartisipasi

No	Mengapa Partisipasi	Frekuensi	Persen (%)
1.	Kewajiban, tanggung jawab dan rasa memiliki	15	40,5
2.	Diajak oleh petugas KSDA	7	18,9
3.	Ikut bekerja untuk memperoleh upah	15	40,5
Jumlah		37	100,00

Sumber : Data primer diolah (2017)

Pada di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong dipengaruhi oleh adanya sosialisasi, permintaan ikut serta dan adanya pendapatan dari hasil pekerjaan (aspek ekonomi). Demikian halnya dengan partisipasi yang muncul sebagai inisiatif masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut sesuai pendapat Sallatang (1987) di Sulawesi Selatan, dimana



diantara masyarakat yang tidak berpartisipasi atau rendah partisipasinya mengemukakan alasan antara lain; tidak diajak, sibuk dengan pekerjaan, tidak tahu, tidak memiliki kemampuan dan tidak mendapat keuntungan. Bagi masyarakat yang turut berpartisipasi dipengaruhi adanya sosialisasi, diajak, diberi kepercayaan, merasa memiliki, tanggung jawab dan mendapat upah.

4. Upaya Berpartisipasi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang keinginan atau kemauan untuk turut berpartisipasi dipengaruhi oleh adanya keterbukaan pihak BBKSDA Papua Barat dan adanya kegiatan sosialisasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Persepsi Masyarakat Tentang Kemauan Berpartisipasi

No	Persepsi Masyarakat Tentang Kemauan Berpartisipasi	Jumlah	Persen (%)
1.	Keterbukaan BBKSDA untuk dilibatkan	20	50,05
2.	Sosialisasi	13	35,14
3.	Penyuluhan dari instansi terkait	4	10,81
Jumlah		37	100,00

Sumber : Data primer diolah (2017)

Respon masyarakat terkait pertanyaan yang diajukan terkait alasan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi didasari tiga hal sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Pada prinsipnya masyarakat menginginkan adanya keterbukaan dari instansi lainnya sebagaimana

BBKSDA Papua Barat selama ini. Masyarakat menginginkan keterlibatan secara baik terkait perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi penyelenggaraan program. Hal ini dimaksudkan khususnya terkait pengelolaan atau pemasaran bibit persemaian yang cukup sulit dilakukan. Menurut Margiyono (1999), dalam pelaksanaan program pendekatan yang digunakan adalah “*top down approach*” yang memandang masyarakat sebagai obyek pembangunan yang harus dipertimbangkan.

4.3. Permasalahan, Tujuan dan Alternatif Upaya Mendukung Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong

4.3.1 Permasalahan

Beberapa permasalahan penting di kawasan Taman Wisata Alam Sorong sebagai berikut :

- a). Sebagian besar Taman Wisata Alam Sorong telah dirambah dan dimanfaatkan untuk pemukiman, jalan dan kegiatan pertanian masyarakat yang luas wilayahnya mencapai 130 ha (13,5%) dari luas kawasan yang berdampak terhadap eksistensi kawasan.
- b). Klaim lahan sebagai hak ulayat dari masyarakat setempat yang berdampak peningkatan pemanfaatan kawasan.
- c). Akses untuk masuk ke dalam kawasan adalah sangat mudah dan tersedia. Hal ini berdampak kepada kerawanan kawasan oleh berbagai gangguan (pencurian kayu dan perburuan satwa).

- d). Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat mencapai target yang direncanakan karena tidak tepat dalam penentuan program atau kegiatan.
- e). Belum ada koordinasi yang baik terkait penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program pengelolaan terutama dengan pihak pemerintah daerah dan pihak swasta termasuk perguruan tinggi dan LSM.
- f). Kebijakan pembatasan anggaran bagi badan pengelola oleh pemerintah yang berdampak terhadap tidak dilakukannya sejumlah program pengelolaan.
- g). Pemenuhan sejumlah kebijakan prasyarat pengelolaan kawasan melalui izin usaha pengelolaan jasa wisata alam dan sarana wisata alam (IUPJWA/IUPSWA) diantaranya DED dan dokumen kelayakan finansial.

Upaya mencegah, menanggulangi kerusakan dan ketidakberhasilan pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong antara lain sebagai berikut :

- a). Pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Sorong diawali dengan mengupayakan pemenuhan dokumen pelengkap IUPJWA dan IUPSWA.
- b). Mengupayakan penyelesaian hak ulayat bagi pemilik kawasan sehingga menjamin eksistensi kawasan.
- c). Guna mengurangi resiko dampak perubahan tutupan lahan hutan, perlu revegetasi pada semua areal yang telah berubah secara ekologis



termasuk wilayah pemukiman milik masyarakat melalui komitmen bersama.

- d). Mengupayakan proses perencanaan yang berbasis multi sektor/phak dalam merumuskan upaya pengelolaan berbasis potensi kawasan.
- e). Untuk kegiatan revegetasi dapat dikembangkan jenis tanamam buah-buahan/obat-obatan sebagai tanaman pelindung (*protecting three*) dan bernilai ekonomis (*economic three*) terutama jenis tanaman berfungsi ganda (*multi purpose tree species/MPTS*) pada wilayah-wilayah yang terbuka.

4.3.2 Tujuan

Sejumlah hal yang penting dan harus diciptakan guna mencapai suatu tujuan program pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong adalah; kombinasi pendekatan perencanaan dari atas dan dari bawah, penguatan pengawasan, evaluasi multi pihak, penegakan hukum, konsistensi kebijakan, meningkatnya fungsi dan intensitas partisipasi masyarakat, sosialisasi intensif, keterbukaan masyarakat dan program pengelolaan.

Melakukan hal-hal tersebut di atas memungkinkan tercapainya keberhasilan program pengelolaan yang dapat menciptakan kondisi positif berikut; tutupan hutan akan bertambah, populasi flora dan fauna meningkat, lahan yang terdegradasi berkurang, tingkat erosi makin rendah dan sedimentasi sungai tidak semakin meluas.



4.3.3 Upaya yang Dapat Dilaksanakan

Ditinjau dari seluruh masalah dan tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong berbasis partisipasi masyarakat harus memberdayakan peran-serta masyarakat di dalam/sekitar kawasan. Kebijakan pengelolaan ditujukan terutama untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok tani hutanyang terdapat di dalam/sekitar kawasan, sehingga masyarakat harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan kawasan (Tabel 12).

Tabel 12. Alternatif Upaya Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong Berbasis Kolaborasi

No	Kondisi Kearah Positif yang harus diciptakan	Alternatif Upaya
1.	Kombinasi perencanaan dari atas dan dari bawah	a. Membuat perencanaan program yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat b. Memberi prioritas terhadap usulan masyarakat
2.	Penguatan pengawasan dalam pelaksanaan program	a. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan b. Melibatkan instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dalam pengawasan pelaksanaan
3.	Evaluasi multipihak	a. Melibatkan masyarakat dalam evaluasi hasil program b. Melibatkan instansi dari lembaga swadaya masyarakat terkait dalam evaluasi program
4.	Tegaknya hukum/peraturan	a. Pelanggaran hukum/aturan ditindak sesuai hukum/aturan yang berlaku b. Melakukan penyuluhan hukum c. Melakukan dan meningkatkan pengawasan kawasan
5.	Konsistensi kebijakan	a. Mengupayakan kebijakan terbaru sesuai potensi kawasan b. Tidak memberi izin penggarapan lahan di dalam kawasan c. Mengupayakan pembayaran hak ulayat masyarakat melalui penyediaan pengelolaan yang bersumber dari APBN maupun APBD. d. Pembangunan fasilitas umum yang dapat

		menimbulkan salah persepsi tidak dikembangkan di Hutan Lindung
6.	Meningkatkan fungsi partisipasi masyarakat	a. Melibatkan masyarakat pada fungsi partisipasi perencanaan b. Melibatkan masyarakat pada fungsi partisipasi pemeliharaan c. Melibatkan masyarakat pada fungsi partisipasi manajemen
7.	Meningkatnya intensitas partisipasi masyarakat	a. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan program pengelolaan b. Meningkatkan kemauan masyarakat untuk melakukan inisiatif tindakan c. Melibatkan masyarakat dalam pengendalian program
8.	Sosialisasi program intensif	a. Melakukan dan meningkatkan frekuensi sosialisasi program b. Setiap tahapan program disosialisasikan
9.	Keterbukaan masyarakat	a. Melakukan penyuluhan b. Memberi pemahaman pada Masyarakat tentang nilai ekologi dan ekonomi hasil-hasil program
10.	Program reboisasi atraktif	a. Menggunakan tanaman multi guna untuk kegiatan reboisasi dilahan yang dikuasai masyarakat b. Menggunakan bibit berkualitas c. Melakukan pemeliharaan intensif d. Merancang kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Pada tabel diatas menunjukkan, bahwa alternatif upayapeningkatan peran serta masyarakat dalam program pengelolaan antara lain : (1) melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, manajemen, pengambilan keputusan, melakukan inisiatif tindakandan pengendalian program; (2) meningkatkan frekuensi sosialisasi,(3) melakukan penyuluhan yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang arti ekonomi dan arti ekologi hasil-hasil program pengelolaan hutan lindung; (4) menggunakan tanaman multi guna berkualitas dan dipelihara secara intensif serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Partisipasi unsur masyarakat di Taman Wisata Alam Sorong mencakup kelompok pemimpin, minat, kepala keluarga, ibu rumah tangga dan pemuda dengan tingkat partisipasi “sangat tidak aktif dan tidak aktif” yang dipengaruhi fungsi partisipasi masyarakat yang umumnya pada pelaksana kegiatan dan intensitas partisipasi unsur masyarakat yang umumnya memberikan konsultasi dan memberikan informasi.
2. Upaya pengelolaan yang dilakukan meliputi:
 - a). Mengupayakan aspek legalitas kawasan (IUPJWA dan IUPSWA) sehingga menjadi dasar pengelolaan program
 - b). Mengupayakan pembayaran hak ulayat untuk menjamin eksistensi kawasan terkait klaim dari masyarakat.
 - c). Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, manajemen, pengambilan keputusan, melakukan inisiatif tindakan dan pengendalian program,
 - d). Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan penyuluhan yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang arti ekonomi dan arti ekologi hasil-hasil program pengelolaan

- e). Mengupayakan program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan penyediaan pasar.

5. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut :

5. Perlu upaya mewujudkan kelengkapan dokumen izin pengelolaan kawasan (IUPSWA dan IUPJWA) sehingga menjadi dasar pengelolaan
6. Partisipasi unsur masyarakat dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam perlu lebih ditingkatkan, melalui (a) peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, manajemen, pengambilan keputusan, inisiatif tindakan dan pengendalian; (b) meningkatkan frekuensi sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai ekonomi dan nilai ekologi hasil-hasil program; (c) mengupayaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pengembangan usaha kelompok tani
7. Mengupayakan dan mengoptimalkan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan kawasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D. 1985 Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Berencana. Orba Sakti, Bandung.
- Admawijaya, R. 1995. Sumber Hayati Hutan Indonesia. Prosiding Simposium Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi di Jakarta (Endang, S; Herman, H; Ishemat, S (penyunting) h 297-306. Fahutan IPB, Yayasan Gunung Menghijau, Yayasan Pendidikan Abarwati, Jakarta.
- Anonim. 1990. Undang - Undang Nomor : 5/1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Arikounto, S. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arimbi, H. P., dan M. A. Santosa. 1993. Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Walhi dan Friends of the Earth – Indonesia.
- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Taman Wisata Alam Sorong Periode 2012-2016, Sorong Papua Barat
- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, 2014. Rencana Pembangunan Jangka Pendak (2015) Taman Wisata Alam Sorong, Sorong Papua Barat
- Barber C.V, Matthews E, Achmaliadi R, Adi M. I.G.G, Hardiono Y.M, Kartodihardjo H, Malley F.CH, Mampioper D.A, Manurung E.G.T, Nababan A, Pangkali L.B. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia : Forest Watch Indonesia dan Washington D.C : Global Forest Watch
- Bratawinata, A.A., 1988. Ekologi Hutan Tropis dan Metode Analisis Hutan. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda
- Berry, D. 1995. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Radja Grafindo Persada, Jakarta. 270 h.
- Fahutan-IPB. 1995. Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Menuju Era Sertifikasi Ekolabel. Dalam Suhendang, E; H. Heuruman; I. Surianegoro (Penyunting). 1995. Prosiding Simposium Penerapan EKolabel di Hutan Produksi di Jakarta. Fakultas Kehutanan IPB/Yayasan Gunung Menghijau/Yayasan Pendidikan Abarwati, Jakarta.

- Margiyono. 1999. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Pedesaan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Mubyarto dan S. Kartodirjo. 1988. Pembangunan Pedesaan Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Nuburi J. 2014. Persepsi dan Sikap Masyarakat Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Skripsi Sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua
- Pamulardi, B. 1999. Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Kehutanan. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ponisri, 2012. Prospek Konservasi Jenis-Jenis Anggrek Di Taman Wisata Alam Sorong Papua Barat. Tesis Program Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Pranoto, H. 2001. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Dalam Rangka Penerepana Desentralisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal (Sebuah Studi di Kutai Kertanegara). Tesis Program Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Sallatang, M. A. 1987. Faktor-Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Sulawesi Tengah. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Sangaji, A. 2002. Politik Konservasi Orang Katu di Behoa Kakau. (S. A. Awang (penyunting). KpSHK, Bogor.
- Sardjono, M. A. 1995. Diktat Agroforestri (tidak dipublikasikan) Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Sardjono, M. A. 1998. Interdependensi Sosial-Ekonomi Masyarakat Dengan Pembangunan Kehutanan dan Tekanannya Terhadap Sumberdaya Hutan di Kalimantan Timur. Laporan Penelitian. Kerjasama Penelitian Antara Balai Penelitian Kehutanan dan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Sarjono, M. A. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Lestari. Makalah pada Seminar Regional Amdal “ Sistem Sertifikasi pengelolaan Hutan Produksi yang Letari “ Kerjasama Silva Mulawarman-PT. Petebe Mas Bahagia – Envirosystem Indonesia. Samarinda.



- Sardjono, M.A. 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya. Debut Press, Jogjakarta
- Sarijanto, T. 1995. Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Prosiding Simposium Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi di Jakarta. (Endang, S., Herman, H., Ishemat, S. (penyunting) h 1-10. Fahutan IPB, Yayasan Gunung Menghijau, Yayasan Pendidikan Abarwati, Jakarta.
- Sembiring., F. Husbani., A. M. Arif., F. Ifalerina., F. Hanif. 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. NRM Program. .
- Simpoha, J. M. 1998. Masalah Pengakuan Formal atas Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Luar Jawa. Duta Rimba majalah Bulanan Perum Perhutani No. 213/XXII, Penerbit Perum Perhutani, Jakarta.
- Simon, H. 2001. Kehutanan Pasca Millenium 2000; Epistemologi Kehutanan Masyarakat. Komoniti. Vol. 1. No. 1. h 4 – 7.
- Sinery A, 2013. Strategi Pengelolaan Populasi Kuskus (*Spilocucus maculatus*) di Pulau Numfor Provinsi Papua. Disertasi Doktor Kehutanan Universitas Mulawarman.
- Sinery A, Chandradewana Boer dan Farida W.R. 2013. Population dynamics of cuscus in tourist island of Ahe, District of Nabire, Papua. Biodiversitas IX (2) 95 - 100
- Sinery A dan Mahmud, 2013. Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Agrifor X (2) 35-40 Untag Samarinda.
- Sinery A.S, Angrianto R., Rahawarin Y dan Peday H.F.Z, 2015. Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Deepublish, Yogyakarta.
- Sinery A.S dan Manusawai J, 2016. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Jurnal Manusia dan Lingkungan 23 (3): 394-401
- Sinery A.S, Matanubun H, Sadsoetoeboen B.M.G, Warmetan H, Kopalit H, Manusawai H, 2017. Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Fakfak 2016-2021. Deepublihs, Yogyakarta.
- Siswanto, H. 1998. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG dalam Rencana Penataan Hutan Pendidikan Bukit Soeharto. Tesis Magister Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman



- Soemarwoto, O. 1987. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, Jakarta.
- Soelaeman, M. M. 1998. Ilmu Sosial Dasar. Refika Aditama, Bandung.
- Sudjana. 1992. Metode Statistika. Tarsito, Bandung.
- Suparmoko. M, 1997. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF E UGM.
- Sutisna, M. 2002. Saran Pengelolaan Hutan Secara Manfaat Berkelanjutan, Kerakyatan, Keadilan, Kebersamaan, Keterpaduan. Membangun Visi Bersama Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Kabupaten Pasir Bekerjasama Dengan Center For International Forestry Research, Tanah Grogot. 14 h.
- Sutrisno, A. 2004. Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Hutan Lindung Tarakan. Tesis Pascasarjana Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Voss, F., 1983. Atlas East Kalimantan Transmigration Area Development Project (TAD). Cooperation between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany : Department of Manpower and Transmigration, Jakarta.
- Zain, A. S. 1997. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Rineka Cipta, Jakarta..
- Zakaria, R. Y. 1994. Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. WALHI, Jakarta.

Lampiran 1. Partisipasi KTH Matoa Berdasarkan Program Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong

Unsur Masyarakat	Tahun 2013		Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		Tahun 2017			Jumlah	Fungsi	Intensitas
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Pemimpin/Tokoh Masyarakat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Esau Sani			1	1		1	1		1	1	1	1	1	9		Memberikan konsultasi
Jumlah			1	1		1	1		1	1	1	1	1			
Kelompok Minat																
Melkianus Bonisau		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Manajemen	Pengendalian total
Yokbet Dubatubun		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Siti Ramla		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Ibu Andi		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Jumlah	4	4	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4			
Kepala Keluarga																
Zet Mubalen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Manajemen	Pengendalian total
Andarias Bonisau		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Manajemen	Pengendalian total
Daniel Rariaro		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Manajemen	Pengendalian total
Agus Samolo			1	1		1	1		1	1	1	1	1	9	Maintanance	Memberikan konsultasi
Soni Sagisolo		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Zet Mubalen		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Abraham Ulimpa			1	1		1	1		1	1	1	1	1	9	Maintanance	Memberikan konsultasi
Set Malaseme		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Fredrik Orno		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Edward Mikin			1	1		1	1		1	1	1	1	1	9	Maintanance	Memberikan konsultasi
Yohanis Bonisau		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Mika Sapisa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Manajemen	Pengendalian total
Amir		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Asparuddin		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Andi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Manajemen	Pengendalian total
Perempuan	12	12	15	15	5	15	15	5	15	15	15	15	15			
Nelce Sapisa			1	1		1	1		1	1	1	1	1	10	Implemnetasi	Pengambilan keputusan
Novita Mubale		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	10	Implemnetasi	Pengambilan keputusan
Regina Sapisa		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan



Rode Ulimpa	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	10	Implemnetasi	Pengambilan keputusan
Rita Samolo	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Eba Kariaro		1	1		1	1		1	1	1	1	1	10	Implemnetasi	Pengambilan keputusan
S.Sagisolo	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	10	Implemnetasi	Pengambilan keputusan
Bosi Samolo	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	11	Planning	Memprakarsai tindakan
Jumlah Pemuda	5	6	8	8	0	8	8	0	8	8	8	8			
Karel Bonisau									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Mika Ulimpa									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Viktor Sani									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Jefri Rariaro									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Godlief Saimar									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Fredrik Rariaro									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Yansen Bless									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Melki Asegeit									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Alfred Reba									1		1	1	3	USE	Memberikan informasi
Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	0	
Total	21	22	27	27	6	27	27	6	36	27	36	36	27	21	

Keterangan

1. Pelatihan Budidaya Anggrek (Rp.30.000.000)
2. Bantuan Usaha Peternakan Ayam (Rp.30.000.000)
3. Pemandu Wista Alam
4. Bantuan Pengembangan Peternakan Ayam
5. Pelatihan Pemadam Kebakaran
6. Pendampingan (Penyuluhan) (Rp.7.000.000)
7. Penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Kampung (Rp.10.000.000)
8. Pelatihan Teknis Pembibitan (Makassar)
9. Program Bank Sampah (Mitra KSDA)
10. Pendampingan (Pemantapan Kelembagaan, Rp.7.000.000)
11. Pelatihan Perbanyakan Tanaman Vegetatif (Rp.7.000.000)
12. Pelatihan Pertanian dalam Polibag (Rp.7.000.000)
13. Pelatihan Interprener Wisata Alam (Rp.7.000.000)



Lampiran 2. Penentuan Bentuk Fungsi dan Intensitas Partisipasi KTH Matoa

Bentuk Partisipasi	Pemimpin	Minat	Keluarga	Wanita	Pemuda	Jumlah
Management	-	1	-	-	-	1
Planning	-	3	-	-	-	3
Implementation	1	-	6	7	-	14
Mainaintenance	-	-	9	1	-	10
Distribution	-	-	-	-	9	9
Jumlah	1	4	15	8	9	37
Persen (%)	2,70	10,81	40,54	21,62	24,32	100,00
Total Control	1	2	1	-	-	4
Initiation Action	-	1	2	2	3	8
Decision Making	-	1	5	2	-	8
Consultation	-	-	1	3	3	7
Informing	-	-	6	1	3	10
Jumlah	1	4	15	8	9	37
Persen (%)	2,70	10,81	40,54	21,62	24,32	100,00

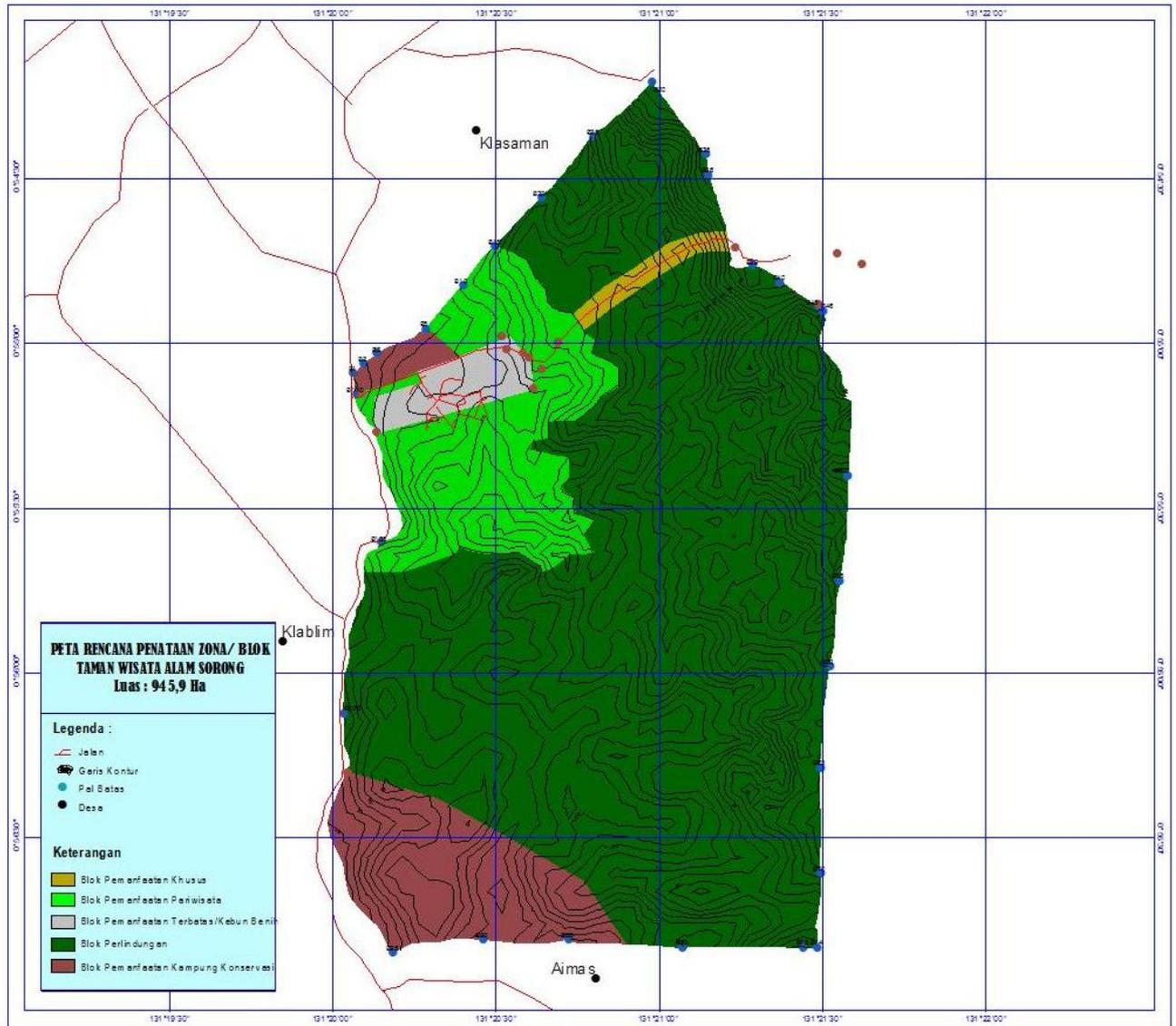


@Hak cipta pada UNIPA
 1. Dilarang mengutip sebagian
 2. Memperbanyak sebagian at

benanya.
 ndag-undang.
 npa menyebutkan
 pakai perantara

eluruh isi karya tulis
 uhi isi karya tulis

Lampiran 3. Peta Lokasi Penelitian



@Hak cipta pada UNIPA
1. Dilarang mengutip
2. Memperbanyak se





@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

LAMPIRAN